

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya perubahan secara terencana seluruh dimensi kehidupan menuju tatanan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Pelaksanaan pembangunan di Indonesia bertumpu pada UUD 1945 tepatnya pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat mengenai tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Tujuan dari pembangunan nasional tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan dan peran serta dari seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan daerah merupakan pilar utama bagi terlaksananya pembangunan nasional. Jadi keberhasilan pembangunan daerah juga merupakan keberhasilan bagi pembangunan nasional.

Pembangunan ekonomi daerah diartikan sebagai suatu usaha bersama antara pemerintah daerah beserta masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki dan membentuk hubungan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak swasta sehingga dapat tercipta lapangan kerja baru dan merangsang tumbuhnya kegiatan perekonomian di masyarakat. Dengan adanya pembangunan ekonomi daerah diharapkan banyak tersedia lapangan kerja, kesejahteraan meningkat, kemakmuran dapat tercapai dan kualitas sumber daya manusia lebih meningkat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus wilayahnya yang berarti pemerintah daerah beserta rakyat bersama-sama membangun sesuai dengan aspirasi, potensi, dan kondisi wilayahnya. Setiap keputusan yang diambil pemerintah daerah lebih mendekatkan kepada permasalahan sehingga penyelesaian dapat lebih cepat dan akurat karena dikerjakan bersama dan diawasi oleh rakyat daerah itu sendiri. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah tersebut maka setiap daerah dapat melakukan perencanaan pembangunan ekonomi yang

disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan kondisi daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan rakyatnya. Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Pembangunan pertanian sebagai sektor pemimpin dalam pembangunan ekonomi nasional didukung oleh pembangunan subsektor-subsektor pertanian. Sektor pertanian secara umum terdiri dari subsektor Tanaman Pangan, subsektor Tanaman Perkebunan, subsektor Peternakan, subsektor Kehutanan dan subsektor Perikanan.

Di Indonesia kemiskinan selalu terkait dengan sektor pekerjaan di bidang pertanian untuk daerah pedesaan dan sektor informal di daerah perkotaan. Menurut Chatani (2011), pada tahun 2007 pekerja miskin banyak bekerja di sektor pertanian dimana sektor pertanian ini terdapat di perdesaan (60,3%) dan sektor jasa dominan terdapat di perkotaan (8,5%). Ini membuktikan bahwa masyarakat miskin tinggal di perdesaan dan bekerja di sektor pertanian dan bersifat informal. Keterbatasan skill dan pengetahuan menyebabkan pekerja miskin bekerja di sektor-sektor yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

Sektor pertanian mempunyai peran yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional, antara lain berupa kontribusi dalam pembentukan PDRB, penyediaan pangan dan pakan, penyediaan sumber devisa, penyediaan bahan baku industri, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, perbaikan pendapatan masyarakat, dan sumber bio-energi (Kementerian Pertanian, 2009).

Pembangunan pertanian ditujukan dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani dan pelaku usaha pertanian. Dalam pencapaian tujuan tersebut, kegiatan pembangunan pertanian menuntut termanfaatkannya seluruh potensi yang ada di masyarakat, baik potensi sumberdaya alam, manusia, teknologi

dan juga sumberdaya institusi secara optimal, menguntungkan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Di Kabupaten Madiun sendiri sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki luas wilayah yang cukup besar hal ini diketahui dengan dimana sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Di Kabupaten Madiun total PDRB ADHK 2000 tahun 2010—2013 PDRB sektor pertanian sebesar Rp. 3.523,39 milyar, yang didukung oleh subsektor tanaman bahan makanan sebesar (Rp. 2.416,37 milyar), subsektor perkebunan (Rp. 446,39 milyar), subsektor peternakan (Rp. 491,64 milyar), subsektor kehutanan (Rp. 141,97 milyar) dan subsektor perikanan (Rp. 27,03 milyar). Peranan sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 35,40 persen, dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,34 persen dari tahun sebelumnya. Subsektor tanaman bahan makanan memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB sektor pertanian, mengingat struktur masyarakatnya yang masih agraris serta kondisi lahan yang subur. (BPS Kabupaten Madiun, 2013).

Identifikasi dan klasifikasi subsektor pertanian diperlukan untuk memberikan gambaran subsektor mana yang aktifitasnya menjadi basis perekonomian atau maju, potensial, sedang berkembang dan mana pula yang terbelakang sehingga dapat dilakukan penentuan subsektor prioritas. Pemerintah daerah perlu membuat strategi pembangunan berdasarkan prioritas ini agar kebijakan pembangunan pertanian di daerah dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan klasifikasi tersebut pemerintah dapat pula menyusun program pembangunan melalui hasil setiap klasifikasi menurut basisnya yang tentunya juga disesuaikan dengan kebijakan anggaran pembangunan, khususnya pembangunan pertanian. Dengan demikian pembangunan pertanian dapat berjalan dengan baik dan terarah guna mencapai kesejahteraan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya.

B. Perumusan Masalah

Banyaknya sumberdaya dalam pertanian yang belum termanfaatkan merupakan tujuan utama dalam hal pembangunan pertanian guna mencapai adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dengan

memanfaatkan potensi yang ada dalam sumberdaya pertanian. Untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian ini dilakukan identifikasi dan klasifikasi subsector dalam pertanian untuk menggali potensi tersebut. Klasifikasi dan identifikasi ini bertujuan pula untuk menyusun strategi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek dalam pembangunan pertanian.

Adanya rencana strategi dalam peningkatan pertumbuhan sektor pertanian tahun 2013 berdasarkan tinjauan ekonomi di Kabupaten Madiun diketahui bahwa terdapat rencana pendirian pusat pelatihan budidaya tanaman padi organik di Kabupaten Madiun bertempat di Desa Sidorejo Kecamatan Saradan yang diharapkan akan mampu meningkatkan hasil produksi padi dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Selain itu, juga diberikan bantuan subsidi untuk pengadaan pupuk melalui gapoktan agar petani mampu memproduksi sendiri pupuk organik dan pertisidanya yang ramah lingkungan sehingga Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah penyangga stok pangan nasional dan sekaligus sebagai lumbung pangan untuk Jawa Timur bagian Barat dengan dikembangkannya kawasan agropolitan diharapkan dapat memacu peranan subsektor pendukung pada sektor pertanian. namun untuk subsektor peternakan masih mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 8,46 persen pada tahun 2012 menjadi 5,63 persen pada tahun 2013. Sedangkan bila dilihat dari kondisi geografis, di Kabupaten Madiun kurang memberi ruang yang cukup luas untuk perkembangan agribisnis ikan kolam (perikanan darat), namun seiring perjalanan waktu subsektor ini selama kurun waktu 4 tahun mengalami pertumbuhan mencapai 7 persen, sehingga perkembangan agribisnis ikan kolam (perikanan darat) yang terdapat di Kecamatan Kebonsari, Geger dan Dolopo sudah mulai mampu tumbuh lebih cepat. (BPS Kabupaten Madiun, 2013)

Klasifikasi dan identifikasi perlu dilakukan merupakan bentuk dalam pemberdayaan potensi pertanian yang belum termanfaatkan. Sehingga dengan adanya bentuk pengidentifikasian dan klasifikasi inilah akan mampu membuat pemerataan dalam potensi pertanian. Pemerintah pun juga akan

lebih mampu untuk mengatasi banyaknya sumberdaya pertanian dengan hasil berupa strategi dari pengklasifikasian dan identifikasi tersebut.

Berdasarkan perumusan masalah serta latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini membahas beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana klasifikasi subsektor pertanian berdasarkan analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Madiun?
2. Strategi apa yang dapat digunakan untuk mengembangkan subsektor pertanian yang termasuk dalam subsektor prima di Kabupaten Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan berikut:

1. Untuk mengidentifikasi hasil klasifikasi subsektor pertanian berdasarkan analisis Tipologi Klassen melalui pertumbuhan dan kontribusinya terhadap subsektor pertanian di Kabupaten Madiun.
2. Untuk mengidentifikasi strategi secara jangka panjang, menengah dan pendek yang digunakan untuk mengembangkan hasil klasifikasi subsektor pertanian berdasarkan analisis Tipologi Klassen di Kabupaten Madiun.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang berkaitan dengan topik penelitian serta merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Madiun, diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi terutama dalam subsector pertanian.
3. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dari **Wardhani(2011)** dengan judul penelitian *Strategi Pengembangan Komoditi Pertanian di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro* dengan menggunakan beberapa metode yaitu pendekatan Tipologi Klassen, SWOT, QSPM (Quantitive Strategic Planning Matrix) menyatakan bahwa klasifikasi komoditi pertanian di Kecamatan Baureno berdasarkan Tipologi Klassen terdiri dari empat klasifikasi komoditas, yaitu komoditas prima adalah pisang, komoditas potensial terdiri dari padi, tembakau virginia, ayam buras dan ayam ras. Pada komoditas berkembang terdiri dari jagung, ubi kayu, dan kambing. Komoditas terbelakang terdiri dari kedelai, kacang hijau, mangga, kelapa, kapuk randu, sapi dan domba.

Emma Dwi R (2014) dalam analisisnya yang berjudul tentang “Analisis Sektor dan Penentuan PDRB Sektor Unggulan di Wilayah Kebumen”. Dalam analisisnya tersebut variabel yang digunakan yaitu sektor-sektor penunjang PDRB Kabupaten Kebumen dan PDRB Jawa Tengah. Untuk Alat analisis yang digunakan yaitu berupa LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, MRP, dan Overlay. Dalam hasil analisisnya tersebut dihasilkan yaitu dimana sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor primer dan sektor jasa-jasa (sektor tersier) menempati klasifikasi sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat.

Tb. Ari Munandar (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Pembangunan Daerah Klasifikasi Model menggunakan Pohon Keputusan Pendekatan menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis Tipologi Klassen serta melalui pengujian data pelatihan menggunakan tiga algoritma, yaitu J48, NBTree dan REPTree dievaluasi menggunakan teknik cross-validasi menghasilkan pohon keputusan. Dimana dalam hasil kesimpulan penelitian tersebut didapat bahwa berdasarkan studi pertama yang dilakukan,*

yang membandingkan tiga algoritma, algoritma J48 memiliki tingkat akurasi pembentukan aturan klasifikasi yang lebih baik daripada REPTree dan NBTree algoritma, yang sebesar 85,18%. Kesesuaian variabel prediktor hasil pohon keputusan yang terbentuk dari J48 memiliki tingkat yang lebih baik dari kebugaran dan memiliki hasil prediksi nilai deviasi lebih kecil dari REPTree dan NBTree. Pohon keputusan terbentuk dari algoritma J48, dapat digunakan sebagai aturan tingkat klasifikasi dengan memanfaatkan pembangunan daerah dan kontribusi variabel tingkat pertumbuhan dari kedua kabupaten dan pengembangan indikator PDB diambil provinsi. Hasil model klasifikasi menunjukkan bahwa ada dua kabupaten di Banten yang masih dalam status daerah yang relatif terbelakang, yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Sementara, Kendal, Magelang, Pemalang, Rembang, Semarang dan Wonosobo merupakan daerah di Jawa Tengah dengan kuadran pembangunan juga pada status wilayah yang relatif terbelakang.

Riyani (2006) dalam penelitiannya yang berjudul *Identifikasi dan Komoditi Pertanian Unggulan di Kabupaten Karanganyar* menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis *Location Quotients* (LQ), komoditi pertanian subsektor tanaman bahan makanan yang menjadi unggulan di paling banyak kecamatan di Kabupaten Karanganyar adalah padi sawah dan mangga. Kedua komoditi tersebut merupakan komoditi yang menjadi unggulan di delapan kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Komoditi padi sawah banyak diusahakan oleh penduduk Karanganyar yang berada di daerah dataran rendah seperti di Kecamatan Karanganyar, Tasik Madu, Jaten, Kebakkramat, dan Mojogedang. Hal ini didasarkan pada karakteristik dari komoditi padi sawah yang lebih cocok ditanam di dataran rendah. Dalam rangka pengembangan komoditi padi, pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2004 telah melaksanakan proyek bantuan pengadaan benih padi di Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan di Kecamatan Jaten, Tasik Madu, Kebakkramat, Karanganyar, Gondangrejo, Kerjo, Karangpandan, Matesih, Jumantono, Jumapolo. Kegiatan yang dilakukan tersebut berupa pemberian

bantuan benih padi varietas IR 64 sebanyak 31.250 kg untuk lahan terkena kekeringan seluas 1.250 Ha. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan produksi gabah, meningkatkan swasembada beras dan optimalisasi pemanfaatan lahan sawah di Kabupaten Karanganyar.

Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
Wardhani (2011)	<i>Strategi Pengembangan Komoditi Pertanian di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro</i>	Dalam penelitian Wardhani(2011) menggunakan beberapa metode yaitu Pendekatan Tipologi Klassen, SWOT, QSPM (<i>Quantitive Strategic Planning Matrix</i>). Data yang digunakan berupa hasil komoditi pertanian yang ada di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro	Dalai penelitian yang saya lakukan sama-sama menggunakan metode pendekatan Tipologi Klassen yang digunakan oleh peneliti terdahulu
Emma Dwi R (2014)	<i>Analisis Sektor dan Penentuan PDRB Sektor Unggulan di Wilayah Kebumen</i>	Penelitian oleh Emma Dwi R(2014) menggunakan alat analisis berupa LQ, Shift Share, Tipologi Klassen, MRP, dan Overlay. Dalam penelitiannya meneliti tentang analisis sektor dan menentukan sektor mana yang menjadi unggulan dengan melihat data PDRB. Namun tidak menambahkan strategi pengembangan agar sektor unggulan tetap bertahan menjadi unggulan.	Metode Tipologi Klassen oleh peneliti terdahulu saya gunakan sebagai rujukan dengan menambahkan strategi pengembangan pada sektor yang menjadi unggulan
Tb. Ari Munandar dan Edi Winarko (2015)	<i>Pembangunan Daerah Klasifikasi Model menggunakan Pohon Keputusan Pendekatan</i>	Metode yang digunakan yaitu berupa metodologi Tipologi Klassen dan pengujian data pelatihan menggunakan tiga algoritma yaitu J48, NBTree dan REPTree dievaluasi menggunakan teknik cross-validasi menghasilkan pohon keputusan. Dalam penerapan metode tersebut dihasilkan mana daerah yang merupakan relatif terbelakang pada hasil penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan mengklasifikan tiap daerah pada sebuah Kabupaten.	Metode Tipologi Klassen dan mengklasifikan mana yang menjadi sektor prima, potensial, berkembang terbelakang merupakan persamaan pada penelitian yang saya dilakukan dengan peneliti terdahulu
Riyani (2006)	<i>Identifikasi dan Komoditi Pertanian Unggulan di Kabupaten Karanganyar</i>	Penelitian oleh Riyani(2006) menggunakan alat analisis berupa Location Quotients (LQ) dengan data yang diteliti yaitu komoditi pertanian yang ada didaerah penelitian,tidak memberikan tambahan strategi dari hasil identifikasi yang telah diteliti	Identifikasi merupakan persamaan dalam penelitian yang saya lakukan terhadap peneliti terdahulu.

B. Landasan Teori

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana akan berkaitan erat dengan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimumkan dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah perencanaan harus dilakukan sebagai tahap penting dalam proses pembangunan (Widodo, 2006).

Perencanaan pembangunan daerah bukanlah perencanaan dari suatu daerah, tetapi perencanaan untuk suatu daerah. Perencanaan pembangunan daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sector swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta dalam menciptakan nilai sumber-sumber daya swasta secara bertanggung jawab. Tahapan dalam perencanaan pembangunan daerah terdiri dari 6 tahap, yaitu : pengumpulan dan analisis data, pemilihan strategi pembangunan daerah, pemilihan proyek pembangunan, pembuatan rencana tindakan, penentuan rincian proyek dan perencana secara keseluruhan dan implementasi (Kuncoro, 2004)

Baik dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam pembangunan daerah, pendekatan perencanaan dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral adalah dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam. Pendekatan regional adalah melihat pemanfaatan ruang serta interaksi

berbagai kegiatan di dalam ruang wilayah. Jadi dalam hal ini kita melihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dan bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan pada tercapainya kehidupan yang lebih efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi ini karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi dan perbedaan aktivitas utama di masing-masing ruang dimana perbedaan itu harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung menciptakan pertumbuhan yang serasi dan seimbang (Tarigan, 2005).

2. Pembangunan

Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses transportasi dan proses tersebut membawa perubahan dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi manfaat dari akumulasi yang membawa pada peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan (Arsyad, 2005).

Menurut Suryana (2000), keberhasilan suatu usaha pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari pengalaman pembangunan negara-negara yang sekarang sudah maju, keberhasilan pembangunan pada dasarnya dipengaruhi oleh dua unsur pokok yaitu unsur ekonomi (sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pembentukan modal dan teknologi) dan unsur non ekonomik (politik, sosial, budaya dan kebiasaan).

Menurut Mulyadi (2004), tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam arti luas (kesejahteraan lahir maupun batin). Kesejahteraan lahir akan terkait dengan tingkat kehidupan baik yang menyangkut ekonomi maupun strata sosial, sementara kesejahteraan bathin akan berkaitan dengan *believe system* yang ada pada dirinya. Bagaimana manusia memahami dirinya (*self understanding*), menerima dirinya (*self acceptance*) serta bagaimana cara

dia mengaktualisasikan dirinya (*self actualization*) sehingga merasa puas (*satisfaction*).

3. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses jangka panjang yang meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan pendapatan agregat. Proses pembangunan juga akan membawa dengan sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi nasional. Perubahan atau pendalaman struktur ekonomi ini terjadi terutama didorong oleh pendapatan per kapita (Tambunan, 2000).

Proses pembangunan ekonomi melibatkan kegiatan-kegiatan produksi (barang dan jasa) di semua sektor ekonomi untuk keperluan kegiatan-kegiatan tersebut, perlu dibangun pabrik-pabrik, gedung perkantoran, mesin dan alat-alat produksi. Selain itu juga perlu disiapkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang terampil, untuk pengadaan semua itu, termasuk fasilitas seperti gedung sekolah, perpustakaan dan sebagainya untuk mendukung penyiapan SDM, diperlukan dana yang disebut dana investasi (Setyowati, 2007).

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti tinggi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, semakin terbukanya kesempatan kerja sehingga dapat menekan pengangguran, menurunnya jumlah penduduk yang hidup di bawah kemiskinan absolut, pergeseran struktur ekonomi kearah yang lebih modern dan semakin besarnya kemampuan keuangan untuk membiayai administrasi pemerintah dan kegiatan pembangunan (Soekarni dkk, 2000).

Usaha-usaha pembangunan yang sedang giat dilaksanakan oleh negara-negara sedang berkembang (*developing countries*) di dunia pada umumnya berorientasi kepada bagaimana memperbaiki atau mengangkat tingkat hidup (*level of living*) masyarakat di negara-negara tersebut agar mereka bisa hidup seperti masyarakat di negara-negara maju. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu jawaban yang seakan-akan

menjadi semacam kunci keberhasilan suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya (Suryana, 2000).

4. Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta kemampuan untuk mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) (Republik Indonesia, 2008).

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 1999).

5. Pembangunan Pertanian

Paradigma baru pembangunan pertanian perlu dikembangkan berdasarkan pada pendekatan sistem agribisnis, yaitu lima premis dasar agribisnis. *Pertama*, adalah suatu kebenaran umum bahwa semua usaha

pertanian berorientasi laba (*profit oriented*), termasuk di Indonesia. *Kedua*, pertanian adalah komponen rantai dalam sistem komoditi, sehingga kinerjanya ditentukan oleh kinerja sistem komoditi secara keseluruhan. *Ketiga*, pendekatan sistem agribisnis adalah formulasi kebijakan sektor pertanian yang logis, dan harus dianggap sebagai alasan ilmiah yang positif, bukan ideologis dan normatif. *Keempat*, Sistem agribisnis secara intrinsik netral terhadap semua skala usaha, dan *kelima*, pendekatan sistem agribisnis khususnya ditujukan untuk negara sedang berkembang. Rumusan inilah yang nampaknya digunakan sebagai konsep pembangunan pertanian dari Departemen Pertanian, yang dituangkan dalam visi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi (Mubyarto dkk, 2003).

Pembangunan pertanian di Indonesia sebenarnya telah menunjukkan kontribusi yang sukar terbantahkan, bahwa peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui varietas unggul, lonjakan produksi peternakan dan perikanan telah terbukti mampu mengatasi persoalan kelaparan dalam empat dasawarsa terakhir. Pembangunan perkebunan dan agroindustri juga telah mampu mengantarkan pada kemajuan ekonomi bangsa, perbaikan kinerja ekspor, dan penyerapan tenaga kerja. Selama empat dasawarsa terakhir, strategi pembangunan pertanian mengikuti tiga prinsip penting: (1) *broad-based* dan terintegrasi dengan ekonomi makro, (2) pemerataan dan pemberantasan kemiskinan, dan (3) pelestarian lingkungan hidup. Dua prinsip utama telah menunjukkan kinerja yang baik, seperti diuraikan di atas, karena dukungan jaringan irigasi, jalan-jembatan, perubahan teknologi, kebijakan ekonomi makro, dan sebagainya (Arifin, 2008).

6. Strategi Pembangunan Pertanian

Secara makro strategi tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) penetapan kembali paradigma pembangunan ekonomi menjadi berbasis sumber daya domestik, (2) pengendalian sistem moneter, (3) regulasi di

bidang investasi dan pemberian intensif bagi produsen, (4) intervensi dalam pengintegrasian sektor pertanian dengan perekonomian global, (5) penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan agribisnis, termasuk peningkatan keberpihakan lembaga keuangan kepada petani; (6) restrukturisasi Departemen Pertanian dengan "mengumpulkan" kembali subsektor perikanan darat bersama dengan subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, subsektor tanaman perkebunan, dan subsektor peternakan disertai dengan perhatian pada SDM petaninya, (7) peninjauan dan penetapan kembali tata ruang peruntukan lahan untuk pertanian dalam arti luas, (8) restrukturisasi kelembagaan dan manajemen penelitian dan pengembangan sektor pertanian, (9) penerapan standar mutu produk pertanian dan standar keamanan lingkungan, dan (10) penerapan otonomi daerah yang mendorong pada pemeliharaan atau perbaikan sumber daya alam (Mugnisjah, 2007).

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian maka strategi dasar pembangunan pertanian yaitu: (Fakultas Pertanian Brawijaya, 2008).

1. Pembangunan pertanian perlu diarahkan pada pengembangan komoditas unggulan berdasarkan keunggulan komparatif melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi dengan pembangunan pedesaan.
2. Pembangunan pertanian harus mendahulukan kesejahteraan petani dalam arti luas dengan menumbuh kembangkan partisipasi petani melalui sistem kelembagaan yang mandiri sehingga petani dapat akses terhadap teknologi, modal, dan pasar.
3. Peningkatan dan pengembangan inovasi teknologi untuk menghasilkan produktivitas dan kualitas produk usatani dan agroindustri spesifik lokasi perlu dikembangkan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas pertanian Indonesia.

Strategi baru yang coba ditawarkan sehubungan dengan determinan pola baru pembangunan pertanian di masa mendatang. Strategi yang telah

terbukti dan teruji selama ini tidak harus ditinggalkan, hanya perlu dilengkapi dengan beberapa dimensi berikut: (Arifin, 2007).

- a. Pembangunan pertanian wajib mengedepankan riset dan pengembangan (R&D), terutama yang mampu menjawab tantangan adaptasi perubahan iklim.
- b. Integrasi pembangunan ketahanan pangan dengan strategi pengembangan energi, termasuk energi alternatif. Strategi ini memang baru berada pada tingkat sangat awal sehingga Indonesia tidak boleh salah melangkah. Indonesia memang terlambat sekali dalam menyandingkan ketahanan pangan dengan energi alternatif. Maksudnya, Indonesia butuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebijakan pada tingkat Instruksi Presiden Nomor 1/2006 tentang Bahan Bakar Nabati dan Peraturan Presiden Nomor 5/2006 tentang Diversifikasi Energi.

7. Peranan Pertanian

Menurut Lynn (2003) dalam Naftali (2008), pertanian memiliki kontribusi yang sangat besar kepada pembangunan. Kontribusi pertanian tersebut adalah:

- a. Meningkatkan persediaan makanan.
- b. Pendapatan dari ekspor.
- c. Pertukaran tenaga kerja ke sektor industri.
- d. Pembentukan modal.
- e. Kebutuhan akan barang-barang pabrikan.

Secara tradisional peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya dipandang pasif dan bahkan hanya dianggap sebagai unsur penunjang semata. Berdasarkan pengalaman sejarah yang dijalankan oleh negara-negara barat, apa yang disebut sebagai pembangunan ekonomi diidentikkan dengan transformasi struktural tentang perekonomian secara cepat yaitu dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian menjadi perekonomian industri modern dan jasa-jasa yang serba lebih kompleks. Dengan demikian peranan utama pertanian dianggap hanya

sebatas sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah demi berkembangnya sektor-sektor industri yang dinobatkan sebagai "sektor unggulan" dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Todaro, 2000).

8. Tipologi Klassen

Pertumbuhan ekonomi bersangkutan paut dengan proses pembangunan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan hasil pendapatan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan membawa masing-masing daerah membentuk suatu pola pertumbuhan dimana dapat digolongkan dalam klasifikasi. Pengklasifikasian diperlukan untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen (Djojohadikusumo, 1994).

Klassen tipologi digunakan untuk memberikan gambaran tentang pola pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu daerah. Teknik ini membagi daerah menjadi empat kuadran berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita daerah. Empat kuadran pembangunan yang dimaksud yaitu kuadran I, merupakan daerah maju dan cepat tumbuh. Kategori ini ditunjukkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita suatu daerah, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan dibandingkan dengan provinsi, kuadran II, daerah maju tapi tertekan. Ditunjukkan dengan tarif yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tetapi pendapatan per kapita lebih tinggi dari rata-rata provinsi, Kuadran III, merupakan daerah berkembang pesat. Ditunjukkan dengan tingkat yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi tetapi pendapatan per kapita lebih rendah dari rata-rata provinsi, kuadran IV, adalah daerah yang relatif terbelakang, tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, lebih rendah dari provinsi. (Ari Munandar, 2015)

Teknik Tipologi Klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut Tipologi Klassen, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat

diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial, dan terbelakang. Analisis ini mendasarkan pengelompokan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Penentuan kategori suatu sektor ke dalam empat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya dan rerata besar kontribusi sektoralnya terhadap PDRB, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. (Widodo,2006)

Tabel 1. Matrik Tipologi Klassen

Rerata Laju Pertumbuhan Sektoral	Rerata Kontribusi Sektoral	
	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$
$r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$	Sektor Prima	Sektor Berkembang
$r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Keterangan:

Y_{sektor} : nilai sektor ke-i

Y_{PDRB} : rata-rata PDRB

r_{sektor} : laju pertumbuhan sektor ke-i

r_{PDRB} : laju pertumbuhan PDRB

Hasil pemetaan dari analisis Tipologi Klassen, bila dikaitkan dengan kegiatan perencanaan untuk pengembangan ekonomi daerah di masa mendatang, antara lain dapat dilakukan dengan strategi pengembangan. Pengembangannya menurut periode waktunya dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu prioritas pengembangan ekonomi untuk masa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk periode jangka pendek bagaimana pemerintah mengupayakan kegiatan ekonomi yang masuk dalam kategori potensial diupayakan untuk menjadi sektor prima dengan mendorong pertumbuhannya yang lebih cepat lagi. Jangka menengah, pemerintah daerah mengupayakan sektor yang saat ini berstatus sektor berkembang menjadi sektor prima dengan memperbesar

porsi *outputnya* pada perekonomian daerah, dan sektor berkembang yang tadinya berasal dari sektor terbelakang diupayakan menjadi sektor prima dalam jangka panjang. Berikut matriks strategi pengembangannya.

Tabel 2. Matriks Strategi Pengembangan

Jangka Pendek (1-5 tahun)	Jangka Menengah (5-10 tahun)	Jangka Panjang (10-25 tahun)
Sektor Prima	Sektor Berkembang menjadi Sektor Prima	Sektor Berkembang menjadi Sektor Prima
Sektor Potensial menjadi Sektor Prima	Sektor Terbelakang menjadi Sektor Berkembang	

Sumber: Widodo, 2006

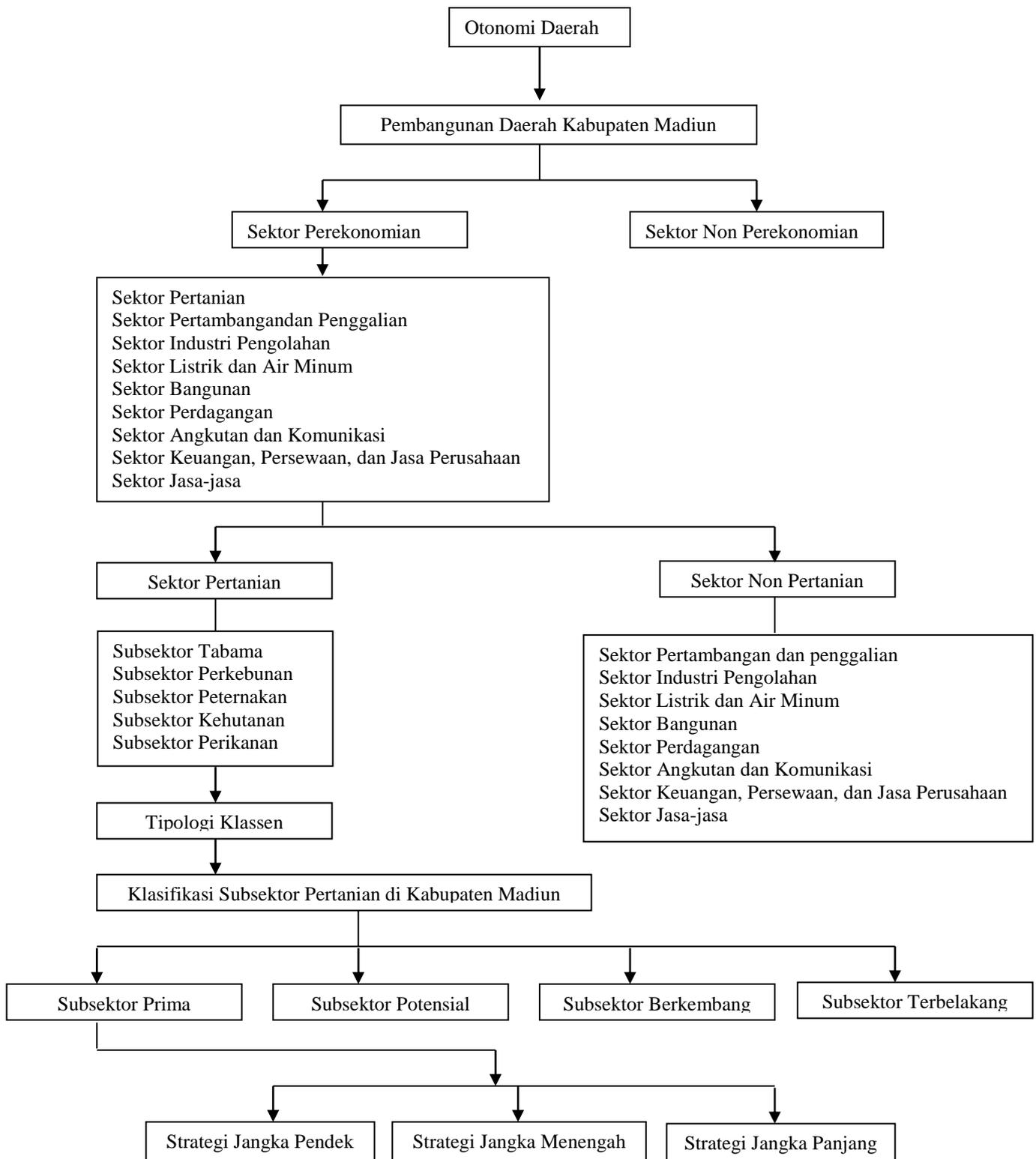
C. Kerangka Teori Pendekatan Masalah

Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses transportasi dan proses tersebut membawa perubahan dalam alokasi sumber-sumber ekonomi, distribusi manfaat dari akumulasi yang membawa pada peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan (Arsyad, 2005). Tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam arti luas (kesejahteraan lahir maupun bathin). Kesejahteraan lahir akan terkait dengan tingkat kehidupan baik yang menyangkut ekonomi maupun strata sosial, sementara kesejahteraan bathin akan berkaitan dengan *believe system* yang ada pada dirinya. Bagaimana manusia memahami dirinya (*self understanding*), menerima dirinya (*self acceptance*) serta bagaimana cara dia mengaktualisasikan dirinya (*self actualization*) sehingga merasa puas (*satisfaction*). (Mulyadi, 2004)

Dengan adanya tujuan dari pembangunan itulah maka baik pemerintah serta masyarakat saling membantu dan bekerjasama untuk mewujudkan hal tersebut. Peran kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat terlaksananya pembangunan yang efektif serta efisien

dan mampu membuat pembangunan yang berkembang maju. Adanya pelaksanaan pembangunan ini dilakukan juga sebagai bentuk adanya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk terlaksananya pembangunan.

Dalam pembangunan perekonomian melalui pertanian diperlukan adanya suatu strategi untuk mengetahui mana sektor-sektor perekonomian mana yang perlu ditingkatkan untuk menambah pembangunan. Dengan mengetahui sektor perekonomian mana saja yang perlu ditingkatkan akan memudahkan untuk meningkatkan pembangunan pertanian. Untuk mengetahui sektor-sektor mana dalam perekonomian yang perlu ditingkatkan inilah dilakukan dengan menggunakan metode Tipologi Klassen dimana sektor perekonomian dan sektor pertanian akan dikelompokkan menjadi 4 (empat) sektor yaitu sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang. Dari sektor perekonomian serta pertanian yang telah dikelompokkan melalui Tipologi Klassen tersebut kemudian dibuatlah strategi untuk peningkatan sesuai pengelompokkan dalam Tipologi Klassen tersebut.



Gambar 1. Kerangka teori Peran Subsektor Pertanian Dalam Pembangunan Perekonomian di Kabupaten Madiun.

D. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini analisis dibatasi hanya menggunakan pendekatan Tipologi Klassen. Pembatasan analisis ini hanya menggunakan pendekatan Tipologi Klassen karena dalam Tipologi Klassen mampu mengidentifikasi dan menghasilkan klasifikasi subsektor pertanian ke dalam sektor prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Hasil dari identifikasi tersebut kemudian digunakan untuk penyusunan strategi pengembangan. Strategi Pengembangan menurut periode waktunya dapat dilakukan dalam tiga tahap yaitu prioritas pengembangan ekonomi untuk masa jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Klasifikasi subsektor pertanian menggunakan analisis Tipologi Klassen ini didasarkan dari hasil perbandingan laju pertumbuhan terhadap kontribusi PDRB suatu daerah.

E. Definisi Operasional

1. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan pembangunan daerah yaitu suatu usaha pemerintah daerah mengkoordinasikan semua keputusan ekonomi dalam angka panjang untuk mempengaruhi secara langsung serta mengendalikan pertumbuhan variable-variabel ekonomi untuk mencapai keputusan pendahuluan mengenai tujuan-tujuan pembangunan
3. Pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan

jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya manusia di dalam perkembangan tumbuh-tumbuhan dan hewan

5. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama sumbangannya terhadap PDB, penyediaan lapangan pekerjaan, dan penyediaan pangan dalam negeri.
6. Tipologi Klassen, pengklasifikasian diperlukan untuk mengetahui potensi relatif perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen berupa klasifikasi berdasarkan sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, sektor terbelakang(Djojohadikusumo, 1994)
7. Kontribusi adalah besarnya sumbangan sektor/subsektor perekonomian terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Madiun. Besarnya kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan nilai PDRB sektor/subsektor dengan total PDRB Kabupaten Madiun.
 Kriteria: kontribusi besar: nilai kontribusi sektor/subsektor lebih besar dibandingkan kontribusi PDRB Kabupaten Madiun.
 kontribusi kecil: nilai kontribusi sektor/subsektor lebih kecil dibandingkan kontribusi PDRB Kabupaten Madiun.
8. Laju pertumbuhan adalah perkembangan nilai sektor/subsektor (peningkatan/penurunan). Dalam penelitian ini laju pertumbuhan sektor/subsektor dapat diketahui dengan menghitung selisih nilai PDRB dari tahun akhir dan tahun awal kemudian dibagi dengan nilai PDRB tahun awal.
 Kriteria: Laju pertumbuhan cepat : laju pertumbuhan sektor/subsektor lebih besar daripada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Madiun.
 Laju pertumbuhan lambat : laju sektor/subsektor lebih kecil daripada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Madiun.
9. Sektor/subsektor prima adalah sektor/subsektor yang variabel pertumbuhannya cepat dengan kontribusi PDRB sektor tersebut lebih

besar daripada kontribusi PDRB Kabupaten Madiun. Sektor/subsektor prima merupakan sektor/sub sektor yang memiliki keunggulan lebih dibandingkan sektor/ subsektor lainnya dan merupakan sektor/subsektor yang paling baik.

10. Sektor/subsektor Potensial adalah sektor/subsektor yang mampu bersaing dengan sektor atau subsektor lainnya dan variabel pertumbuhannya lambat tetapi kontribusi PDRB sektor tersebut lebih besar daripada kontribusi PDRB Kabupaten Madiun. Sektor/subsektor potensial merupakan sektor/subsektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan sehingga kedepannya dapat menjadi sektor/subsektor prima.
11. Sektor/subsektor berkembang adalah sektor/subsektor yang dapat bertambah menjadi lebih besar dengan adanya sumber-sumber yang mendukung dengan variabel pertumbuhannya cepat tetapi kontribusi PDRB sektor/subsektor tersebut lebih kecil daripada kontribusi PDRB Kabupaten Madiun. Sektor/subsektor berkembang dapat diupayakan menjadi sektor/subsektor prima dalam jangka waktu menengah dan mampu menjadi sektor/subsektor potensial dalam jangka waktu pendek.
12. Sektor/subsektor terbelakang adalah sektor/subsektor yang tertinggal atau belum maju daripada sektor/subsektor lainnya dan variabel pertumbuhannya lambat dan kontribusi PDRB sektor/subsektor tersebut lebih kecil daripada kontribusi PDRB Kabupaten Madiun. Sektor/subsektor terbelakang dapat diupayakan menjadi sektor/subsektor berkembang dalam jangka waktu panjang.
13. Strategi, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi itu adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak-kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan (Arianto, 2007). Berdasarkan pengertian tersebut maka definisi dari strategi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Madiun dalam penelitian ini adalah serangkaian rencana dalam bidang pertanian yang berdasarkan pola pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dalam jangka waktu tertentu.

14. Strategi pengembangan adalah strategi yang dihasilkan dari sebuah rencana dimana dalam rencana tersebut berisi tujuan untuk mengembangkan daerah agar maju dan sesuai dengan program daerahnya. Sektor pertanian di Kabupaten Madiun dalam penelitian ini adalah serangkaian rencana dalam bidang pertanian yang berdasarkan pola pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dalam jangka waktu tertentu.
15. Strategi pengembangan pertanian adalah usaha atau cara (trik) agar suatu hal (objek) dapat mengalami perkembangan yang bersifat lebih baik/maju terlebih dalam bidang pertanian. Strategi pengembangan subsektor pertanian dalam penelitian ini adalah suatu perencanaan untuk mengembangkan subsektor pertanian yang ada di Kabupaten Madiun berdasarkan pada kontribusi dan laju pertumbuhan subsektor pertanian dalam jangka waktu tertentu. Strategi pengembangan subsektor pertanian ini didasarkan pada periode waktu, yang terdiri dari:
 - a. Strategi jangka pendek dilakukan dalam jangka waktu 1-5 tahun
 - b. Strategi jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu 5-10 tahun
 - c. Strategi jangka panjang dilakukan dalam jangka waktu 10-25 tahun.

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2013).

B. Metode pengambilan daerah penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau *purposive*. Menurut Sugiyono (2013), teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan diharapkan. Pertimbangan dalam penentuan daerah penelitian di Kabupaten Madiun ini didasarkan pada kondisi pertanian di Kabupaten Madiun yang memiliki lahan pertanian dengan total 81042, 61 Ha terbagi 2 yaitu luas lahan pertanian (lahan sawah) sebesar 33130,03 Ha dan luas lahan bukan pertanian (bukan lahan sawah) sebesar 47912,58 Ha (BPS Kabupaten Madiun, 2013). Kondisi tersebut didukung pula terhadap pertimbangan dari data PDRB Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 yang terdapat pada tabel 3. berikut ini.

Tabel 3. PDRB Kabupaten Madiun Menurut Sektor Tahun 2013 (jutaan)

Sektor	2009	2010	2011	2012
Pertanian	1.085.373,78	1.127.800,68	1.159.913,16	1.198.751,46
Pertambangan dan penggalian	15.629,81	15.420,59	15.634,26	15.793,82
Industri pengolahan	95.269,87	98.990,69	103.727,98	108.936,65
Listrik, Gas dan Air Bersih	27.415,84	28.615,95	27.141,52	29.387,67
Bangunan	95.638,99	99.624,69	106.755,26	115.505,44
Perdagangan, Hotel dan Restoran	916.909,51	992.622,23	1.091.629,33	1.198.058,93
Pengangkutan dan Komunikasi	92.503,53	101.311,91	111.343,82	121.913,29
Keuangan, Persewaan dan Jasa	914.00,08	96.010,09	100.452,82	106.633,65
Jasa – Jasa	479.744,55	511.210,71	548.209,31	579.783,32

Sumber: BPS Kabupaten Madiun 2013

Berdasarkan tabel 3. diketahui bahwa sektor pertanian di Kabupaten Madiun memiliki nilai PDRB lebih besar dibandingkan dengan sektor lain yang ada di Kabupaten Madiun, sehingga sektor pertanian di Kabupaten Madiun menjadi prioritas dan perlu adanya strategi yang diterapkan untuk kemajuan dan pengembangan sektor pertanian tersebut.

C. Jenis dan sumber data

Daerah penelitian yang diambil adalah Kabupaten Madiun berdasarkan pertimbangan kontribusi sector pertanian terhadap sektor perekonomian di Kabupaten Madiun.

Data Primer yang digunakan adalah merupakan data yang didapat dari hasil wawancara langsung dan melihat secara langsung daerah penelitian. Data yang didapat ini melalui wawancara langsung petani, penyuluh pertanian serta pihak Dinas Pertanian di Kabupaten Madiun sekaligus melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Data primer yang didapat tersebut digunakan untuk menyusun strategi pengembangan yang didasarkan pada kondisi langsung daerah penelitian.

Data sekunder yang digunakan meliputi data BPS Kabupaten Madiun berupa data PDRB Kabupaten Madiun tahun 2009 – 2013, data BPS Provinsi Jawa Timur berupa PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2009 – 2013, Data RPJMD Kabupaten Madiun dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Madiun.

D. Metode analisis data

1. Klasifikasi Subsektor Pertanian

Penentuan klasifikasi subsektor pertanian dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen. Tipologi Klassen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi sektor, subsektor, usaha atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi subsektor berdasarkan hasil perbandingan menggunakan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan dan kontribusi subsektor terhadap PDRB. Menurut Tipologi Klassen, masing-masing subsektor dalam sektor pertanian dapat diklasifikasikan sebagai subsektor yang Prima, Potensial, Berkembang atau Terbelakang., dengan karakteristik sebagai berikut :

1. **Subsektor Prima** : Subsektor pertanian Kabupaten Madiun dimana memiliki tingkat laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB yang cepat dibandingkan dengan PDRB Kabupaten Madiun.
2. **Subsektor Berkembang** : Subsektor pertanian Kabupaten Madiun yang memiliki kontribusi lebih rendah, tetapi tingkat laju pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan PDRB Kabupaten Madiun.
- Subsektor Potensial** : Subsektor pertanian Kabupaten Madiun yang memiliki tingkat laju pertumbuhan lebih rendah, tetapi kontribusinya lebih tinggi dibandingkan PDRB Kabupaten Madiun.
3. **Subsektor Terbelakang** : Subsektor pertanian Kabupaten Madiun yang memiliki tingkat laju pertumbuhan dan kontribusi yang lebih rendah dibandingkan PDRB Kabupaten Madiun.

Klasifikasi subsektor pertanian didasarkan pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Dasar Klasifikasi Subsektor Pertanian menurut Tipologi Klassen

Kontribusi Subsektor terhadap PDRB	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$	$Y_{\text{sektor}} \leq Y_{\text{PDRB}}$
	Laju Pertumbuhan Subsektor	
$(r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}})$	Subsektor Prima	Subsektor Berkembang
$(r_{\text{sektor}} \leq r_{\text{PDRB}})$	Subsektor Potensial	Subsektor Terbelakang

Keterangan:

Y_{sektor} = kontribusi sektor ke-i

Y_{PDRB} = rata-rata kontribusi PDRB

r_{sektor} = laju pertumbuhan sektor ke-i

r_{PDRB} = laju pertumbuhan PDRB

Jika diketahui kategori atau tipe subsektor, maka dapat ditentukan subsektor prioritas yang akan dikembangkan.

2. Strategi pengembangan subsektor pertanian

Berdasarkan hasil klasifikasi subsektor pertanian melalui pendekatan Tipologi Klassen, maka dalam merumuskan perencanaan pengembangan dalam setiap subsektor pertanian di daerah Kabupaten Madiun dapat dilakukan dengan menentukan beberapa strategi pengembangan yang telah ada dan mencocokkan dengan melihat keadaan yang terjadi pada daerah tersebut. Sehingga strategi yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan serta mampu diterapkan dan dijalankan.

Strategi pengembangan subsektor pertanian ini dapat diketahui melalui matriks strategi pengembangan subsektor pertanian, dimana dalam penentuan tiap subsektor pertanian ini di dasarkan pada periode waktu, yaitu meliputi strategi pengembangan dalam jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (5-10 tahun) dan jangka panjang (10-25 tahun). Berikut Matriks strategi

pengembangan subsektor pertanian di Kabupaten Madiun disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Strategi Pengembangan Subsektor Pertanian

Jangka Pendek (1-5 tahun)	Jangka Menengah (5-10 tahun)	Jangka Panjang (10-25 tahun)
Subsektor Prima	Subsektor Berkembang dan Potensial menjadi Subsektor Prima	Subsektor Terbelakang dan Berkembang menjadi Subsektor Prima
Subsektor Potensial menjadi Subsektor Prima	Subsektor Terbelakang menjadi Subsektor Berkembang	

Dari hasil matrik strategi pengembangan pertanian diketahui bahwa strategi pengembangan yang bisa dilakukan dan diterapkan menurut periode waktunya terdapat tiga macam yaitu adalah strategi pengembangan jangka pendek (1-5 tahun), jangka menengah (6 – 10 tahun) dan jangka panjang (> 10 tahun).

a. Strategi pengembangan jangka pendek

Periode waktu yang dibutuhkan dalam strategi pengembangan jangka pendek adalah antara 1-5 tahun. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan posisi dari subsektor prima. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan cara memanfaatkan subsektor prima seoptimal mungkin. Selain itu, dalam strategi pengembangan jangka ini juga mengupayakan agar subsektor potensial dapat menjadi subsektor prima. Sehingga subsektor potensial dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti subsektor prima. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan subsektor potensial.

b. Strategi pengembangan jangka menengah

Periode waktu yang dibutuhkan dalam strategi pengembangan jangka menengah antara 5-10 tahun. Strategi ini mempunyai tujuan untuk mengupayakan agar subsektor potensial dapat menjadi subsektor prima. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan subsektor potensial. Selain itu, dalam strategi ini juga mengupayakan subsektor berkembang menjadi subsektor potensial, yaitu dengan meningkatkan kontribusi dari subsektor berkembang. Tujuan yang ketiga dari strategi ini adalah mengupayakan agar subsektor terbelakang dapat menjadi subsektor berkembang, yang dapat dilakukan dengan cara meningkatkan laju pertumbuhan subsektor berkembang.

c. Strategi pengembangan jangka panjang

Periode waktu yang dibutuhkan dalam strategi pengembangan jangka panjang antara 10-25 tahun. Tujuan dari strategi ini adalah mengupayakan agar subsektor terbelakang menjadi berkembang. Strategi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan laju pertumbuhan dari subsektor terbelakang. Selain itu, strategi ini juga bertujuan untuk mempertahankan subsektor prima menjadi tetap subsektor prima. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mempertahankan dan serta meningkatkan besarnya kontribusi dan laju pertumbuhan dari subsektor prima.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun

1. Keadaan Alam

Secara geografis Kabupaten Madiun terletak di sekitar $7^{\circ} 12' - 7^{\circ} 48'30''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ} 25'45'' - 111^{\circ} 51'$ Bujur Timur. Keseluruhan luas wilayah 1.010,86 Km² dengan batas – batas wilayah yaitu sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Bojonegoro

Sebelah timur : Kabupaten Nganjuk

Sebelah selatan : Kabupaten Ponorogo

Sebelah barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Jarak Kabupaten Madiun dengan ibukota provinsi Jawa Timur kurang lebih 175 Km ke arah timur, sedangkan jarak dengan ibukota negara kurang lebih 775 Km dengan arah sebaliknya. Kabupaten Madiun dilintasi oleh jalur utama Surabaya – Jogjakarta serta Kabupaten Madiun juga diintasi oleh jalur kereta api jalur selatan dari Surabaya menuju Jakarta Bandung.

Di Tahun 2013 ada dua bulan tanpa hujan sama sekali yaitu bulan Agustus dan September sedangkan di Tahun 2014 ada empat bulan tanpa hujan sama sekali yaitu bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Dengan cuaca yang tidak bisa diperkirakan menjadikan Kabupaten Madiun terkadang mengalami peningkatan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga selalu siaga dengan datangnya musibah banjir. Data takaran hujan diambil dari empat lokasi yaitu Kantor Madiun, PG Rejoagung, PG Kanigoro dan Klegen. Kabupaten Madiun sendiri memiliki lebih dari 30 stasiun hujan yang tersebar di 12 Kecamatan. Stasiun hujan memiliki dua ketinggian dari permukaan laut yang seringkali digunakan untuk menaksir ketinggian suatu wilayah yang berdekatan dengan stasiun hujan tersebut.

Tabel 6. Luas Wilayah Kabupaten Madiun Menurut Kecamatan Tahun 2015

No	Nama kecamatan	Luas wilayah (Km ²)
1.	Kebonsari	47,45
2.	Geger	36,61
3.	Dolopo	48,85
4.	Dagangan	72,36
5.	Wungu	45,54
6.	Kare	190,85
7.	Gemarang	101,97
8.	Saradan	152,92
9.	Pilangkenceng	81,34
10.	Mejayan	55,22
11.	Wonoasri	33,93
12.	Balerejo	51,98
13.	Madiun	35,93
14.	Sawahana	22,15
15.	Jiwan	33,76
Kab. Madiun		1010,86

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Madiun memiliki 15 Kecamatan dengan luas keseluruhan Kabupaten Madiun yaitu 1010,86 Km². Kecamatan Kare merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah yaitu 190,85 Km² dengan sebagian wilayahnya terdiri atas hutan dan perbukitan. Sedangkan Kecamatan Sawahan merupakan kecamatan yang luasnya paling sempit dengan luas yaitu 22,15 Km².

Topografi di wilayah Kabupaten Madiun sendiri sebagian besar berupa dataran. Dimana sebanyak 11 dari 15 kecamatan di Kabupaten Madiun dialiri oleh aliran sungai. Masing – masing nama sungai dan panjangnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 7. Nama Badan Air dan Panjang Sungai di Kabupaten Madiun Tahun 2014

Nama Badan Air	Nama Kecamatan Yang Dilewati	Panjang (Km)
Kali Kembang	Kare	4,00
	Gemarang	2,00
	Mejayan	18,00
	Saradan	3,00
	Pilangkenceng	3,00
Kali Jerowan	Pilangkenceng	4,00
	Balerejo	9,00
Kali Uneng (Notopuro)	Pilangkenceng	14,00
	Balerejo	6,00
Kali Asin	Dolopo	6,50
Kali Sareng	Geger	8,00
Kali Catur	Dagangan	5,00
	Geger	4,50
Kali Songo	Madiun	8,70

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Madiun

Di tahun 2015 ada lima bulan tanpa hujan sama sekali yaitu dari bulan Juni hingga Oktober. Data takaran hujan dari empat tempat lokasi yaitu Kantor Madiun, PG Rejoagung, PG Kanigoro, dan Klegen. Kabupaten Madiun sendiri memiliki lebih dari 30 stasiun hujan yang tersebar di 12 kecamatan. Stasiun hujan memiliki dua ketinggian dari permukaan laut yang seringkali digunakan untuk menaksir ketinggian suatu wilayah yang berdekatan dengan stasiun hujan tersebut. Rata-rata suhu udara di Kabupaten selama bulan Januari hingga Desember berada dalam kisaran 23°C – 24°C. Rata-rata kelembapan udara sekitar 24% (persen).

2. Pemerintahan

Pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur segala kegiatan masyarakat dalam suatu daerah/wilayah/negara yang meliputi segala aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tertentu (BPS Kabupaten Madiun, 2015). Kabupaten Madiun ditinjau secara sah dari pemerintahan, berdiri pada hari Kamis tanggal 18 juli 1568.

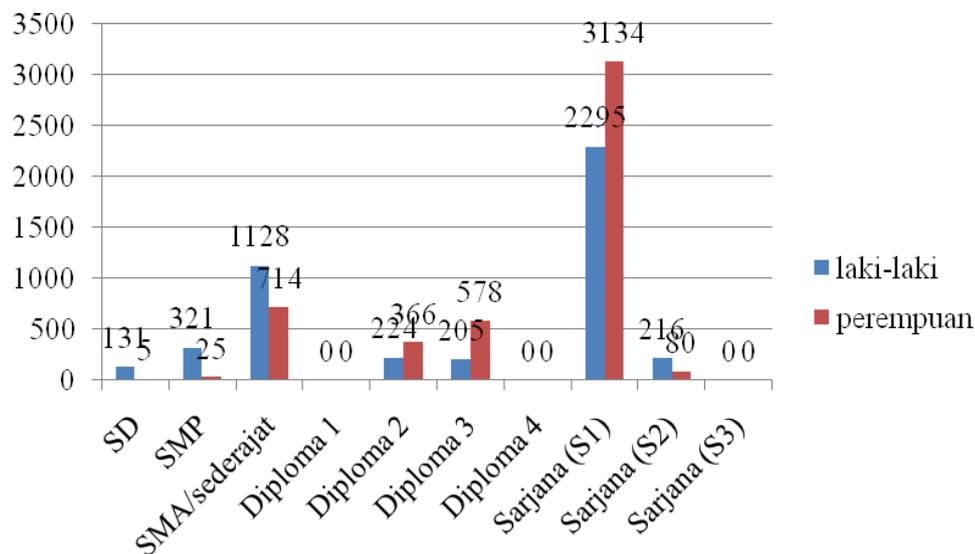
Pemerintahan Kabupaten Madiun pada tahun 2008 yaitu H. Muhtarom, S. Sos terpilih menjadi Bupati Madiun ke 37, menggantikan KRH. Djunaidi Mahendra, SH, M.si, sampai sekarang. Kabupaten Madiun terbagi dalam 15 Kecamatan. Tiap-tiap kecamatan terbagi dalam desa atau kelurahan total terdapat 198 desa dan 8 kelurahan. Dalam mengemban amanahnya, Bupati dibantu oleh 2125 perangkat desa termasuk kepalsa desa/lurah, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) tetap sebagai satuan wilayah terkecil. Menurut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada tahun 2015 ini terdapat 1.172 RW dan 4.866 RT.

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 45 orang, dengan 40 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Secara organisasi, lembaga wakil rakyat tahun ini terdiri dari lima fraksi, yaitu FPDI-P, FPKB,FPKS,FPD dan FPG dengan Fraksi PKB yang terbanyak yaitu 17 orang.

Realisasi Pajak Bumi Dan Bangunan menunjukkan kenaikan lebih dari 40% dibandingkan taun sebelumnya. Kesadaran masyarakat membayar pajak tentunya akan membuat pemerintah semakin leluasa mengatur anggaran untuk kemakmuran bersama.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dinas / instansi pemerintah daerah berjumlah 9.422 terdiri dari 4.519 laki-laki dan 4.903 perempuan. Jenjang pendidikan sebagian besar PNS adalah sarjana (S1). Namun masih terdapat pula yang lulusan sekolah dasar berjumlah 136 pegawai. Mayoritas CPNS dan PNS bergama islam dan kawin

Gambar 2. Komposisi PNS Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin Tahun 2015



Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

3. Keadaan Penduduk dan Tenaga Kerja

Aspek kependudukan merupakan hal yang mendasar dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi sumber daya pembangunan yang optimal jika pembinaannya tepat dan terarah. Namun bisa juga menjadi ancaman serius jika pemerintah tidak bijak dalam menghadapinya. Dengan total penduduk pada akhir tahun 2014 sebesar 720.768 jiwa, Kabupaten Madiun mencatatkan sex ratio sebesar 100,46 yang menandakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk wanita yang lebih kecil. Salah satu faktor yang turut berpengaruh terhadap tingginya jumlah laki-laki dibandingkan perempuan adalah tercatat kelahiran bayi laki-laki besar dibandingkan dengan bayi perempuan pada tahun 2014.

Dinamika jumlah penduduk dipengaruhi oleh faktor alami (kelahiran dan kematian) serta non alami (migrasi masuk dan keluar). Tahun 2014 tercatat ada 4.221 kelahiran, 255 kematian, 1.015 migrasi masuk dan 4.361 migrasi keluar.

Dengan luas wilayah sebesar 1.010,86 km² tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan geger. Sebaliknya kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kare.

Menurut BPS, jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2014 tercatat sebanyak 527.879 jiwa dengan jumlah angkatan kerja sebesar 362.786 mencatatkan angka TPT sebesar 3,38 dengan TPAK sebesar 68,73 persen. Sektor pertanian, kehutanan, perburuhan, dan perikanan merupakan sektor yang dominan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Madiun. Tercatat sebanyak 165.060 tenaga kerja bekerja di sektor ini. Jumlah TKI pada tahun 2013-2014 turun sebesar 7% dari 2.754 pada tahun 2013 menjadi 2.537 pada tahun 2014. Dengan tiga negara tujuan terbanyak yaitu Taiwan, Hongkong dan Singapura.

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Penduduk Pertengahan Akhir Tahun Periode 2010-2014 Menurut Kecamatan

Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
Kebonsari	60887	62103	61991	56104	56928
Geger	67750	69688	69956	63183	64062
Dolopo	62862	65172	64902	56907	58263
Dagangan	53664	56800	56356	50337	51013
Wungu	63168	63440	63119	55798	56252
Kare	35192	34401	34641	32014	32131
Gemarang	35966	38350	38452	33728	33578
Saradan	75225	82752	79013	68373	68420
Pilangkenceng	58665	59998	59707	54483	54678
Mejayan	51381	49985	50026	44885	45469
Wonoasri	34949	37780	37992	34757	35014
Balerejo	45112	48628	48474	43994	44250
Madiun	34949	37780	37992	34757	35014
Sawahan	26182	27158	27184	25108	25313
Jiwan	60243	64426	63821	56246	56966
Jumlah total	771204	803006	797942	714122	720768

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

Tabel 9. Perbandingan jenis kelamin menurut Kecamatan Akhir Tahun 2014

Kecamatan	Jumlah penduduk akhir tahun		Perbandingan jenis kelamin
	Laki-laki	Perempuan	
Kebonsari	28392	28536	99,50
Geger	31980	32082	99,68
Dolopo	29206	29057	100,51
Dagangan	25651	25362	101,14
Wungu	28000	28252	99,11
Kare	16348	15783	103,58
Gemarang	17053	16525	103,20
Saradan	34749	33671	103,20
Pilangkenceng	27377	27301	100,28
Mejayan	22932	22537	101,75
Wonoasri	17673	17341	101,91
Balerejo	22057	22193	99,39
Madiun	18939	19492	97,16
Sawahan	12532	12790	97,91
Jiwan	28324	28642	98,89
Jumlah total	361204	359564	100,46
2013	357579	356543	100,29

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

Tabel 10. Kepadatan Penduduk Pada Akhir Tahun 2010-2014

Kecamatan	Luas area	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
Kebonsari	47,45	1283	1309	1309	1182	1200
Geger	36,61	1851	1904	1904	1726	1750
Dolopo	48,85	1287	1334	1334	1165	1193
Dagangan	72,36	742	785	785	696	705
Wungu	45,54	1387	1393	1393	1225	1235
Kare	190,85	184	180	180	168	168
Gemarang	101,97	353	376	376	331	329
Saradan	152,92	492	541	541	447	447
Pilangkenceng	81,34	721	738	738	670	672
Mejayan	55,22	930	905	905	813	823
Wonoasri	33,93	1030	1113	1113	1024	1032
Balerejo	51,98	868	936	936	846	851
Madiun	35,93	1112	1178	1178	1063	1070
Sawahan	22,15	1182	1226	1226	1134	1143
Jiwan	33,76	1784	1908	1908	1666	1687
Jumlah total	1010,86	763	794	794	706	713

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

4. Sosial

Peningkatan jumlah penduduk jika ingin dijadikan sebagai sumber daya pembangunan yang potensial maka harus dibarengi dengan peningkatan mutu penduduk. Salah satu cara peningkatan mutu penduduk adalah lewat peningkatan sarana maupun prasarana pendidikan dan kesehatan.

Di Kabupaten Madiun pada tahun 2014 jumlah fasilitas pendidikan seperti tersedianya fasilitas sekolah TK, SD, SLTP, maupun SLTA tidak begitu mengalami perubahan yang cukup berarti dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun jumlah rata – rata murid per rombongan belajar dari tingkat TK sampai SLTA antara 15-25 murid per rombongan belajar dengan rasio murid terhadap guru antara 7-14 murid per guru. Dilihat dari ketersediaan fasilitas yang ada masih sangat cukup mencukupi.

Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang baik selain dari fasilitas pendidikan yang memadai juga harus didukung dengan fasilitas kesehatan yang memadai juga. Di Kabupaten Madiun beberapa fasilitas kesehatan yang tersedia antara lain rumah sakit sebanyak 4 buah, puskesmas 26, puskesmas pembantu 58, polindes 84, posyandu 874 dan ponkesdes sebanyak 40 buah. Fasilitas kesehatan tersebar cukup merata di setiap Kecamatan, hampir di setiap kecamatan tersedia Puskesmas dan tenaga dokter dan bidan. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebesar 720.768 jiwa fasilitas yang ada dirasakan masih sangat terbatas, dimana 1 puskesmas masih melayani sekitar 27 ribu penduduk.

Dari jenis penyakit yang diderita masyarakat Kabupaten Madiun, penyakit yang paling banyak diderita untuk golongan umur 0-14 tahun adalah ISPA, sedangkan untuk umur diatas 15 tahun penyakit yang banyak diderita adalah penyakit susunan otot dan jaringan ikat.

Jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, pengangguran bahkan gangguan keamanan, untuk itu sangat penting dilaksanakannya program KB sebagai pengendali pertumbuhan penduduk. Peserta KB tahun 2014 di Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 116.667 atau sekitar 83,22 persen dari pasangan usia subur. Alat KB yang paling banyak digunakan adalah jenis KB Suntik. Jumlah perkawinan pada wanita kelompok umur 20-25 mengalami penurunan, untuk umur dibawah 20 tahun juga mengalami penurunan jika dibanding pada tahun lalu. Peningkatan terjadi justru pada pernikahan dengan usia wanita diatas 30 tahun, hal ini mengindikasikan bahwa perempuan cenderung untuk mengejar karier terlebih dahulu daripada menikah.

Dilihat dari aspek keamanan, tindak kejahatan yang terjadi Kabupaten Madiun pada tahun 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2013, penurunan terjadi hampir 13 persen dari 341 kasus menjadi 298 kasus terlaporkan. Dari tindak kejahatan yang ada penyalahgunaan obat keras menjadi kasus dengan jumlah kejadian paling tinggi.

5. Pertanian

Penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sehingga sesuai potensi daerah yang agraris maka mata pencaharaian penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar adalah bekerja di bidang pertanian. Baik sebagai petani pemilik lahan maupun petani penggarap alias buruh tani.

Berdasarkan data luas panen dan produksi untuk sektor tanaman pertanian dalam hal ini mencakup tanaman pangan, tanaman obat, tanaman buah, dan tanaman sayur mengalami peningkatan jumlah luas panen dan produksi di tahun 2014. Di mana, komoditi padi masih memberikan kontribusi luas panen dan hasil produksi terbesar di Kabupaten Madiun.

Pada sektor perkebunan terbesar seperti kopi, karet, dan cengkeh mengalami penurunan hasil produksi di tahun 2014. Akan tetapi untuk komoditi porang mengalami kenaikan nilai produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ada, untuk ketersediaan ternak di Kabupaten Madiun mayoritas mengalami peningkatan angka jumlah hampir di setiap jenis ternak dan unggas. Untuk produksi daging, kulit, susu dan telur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai konsumsi daging dan ikan untuk Kabupaten Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya. penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar tinggal di daerah pedesaan sehingga sesuai potensi daerah yang agraris maka mata pencaharaian penduduk Kabupaten Madiun sebagian besar adalah bekerja di bidang pertanian. Baik sebagai petani pemilik lahan maupun petani penggarap alias buruh tani.

Berdasarkan data luas panen dan produksi untuk sektor tanaman pertanian dalam hal ini mencakup tanaman pangan, tanaman obat, tanaman buah, dan tanaman sayur mengalami peningkatan jumlah luas panen dan produksi di tahun 2014. Di mana, komoditi padi masih memberikan kontribusi luas panen dan hasil produksi terbesar di Kabupaten Madiun.

Pada sektor perkebunan terbesar seperti kopi, karet, dan cengkeh mengalami penurunan hasil produksi di tahun 2014. Akan tetapi untuk

komoditi porang mengalami kenaikan nilai produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang ada, untuk ketersediaan ternak di Kabupaten Madiun mayoritas mengalami peningkatan angka jumlah hampir di setiap jenis ternak dan unggas. Untuk produksi daging, kulit, susu dan telur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai konsumsi daging dan ikan untuk Kabupaten Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 11. Luas Lahan Pertanian Menurut Penggunaannya Tahun 2014

Kecamatan	Lahan sawah (Ha)			Jumlah total
	Irigasi teknis	Tadah hujan	Jumlah total	
Kebonsari	3020,00	-		3020,00
Geger	2121,00	120,00		2241,00
Dolopo	1742,00	78,00		1820,00
Dagangan	2512,40	55,00		2567,70
Wungu	2479,00	-		2479,00
Kare	976,00	138,00		1114,00
Gemarang	608,00	108,00		716,00
Saradan	2150,00	752,00		2902,00
Pilangkenceng	3465,00	554,00		4019,00
Mejayan	1868,00	70,00		1938,00
Wonoasri	1341,84	113,86		1455,70
Balerejo	3687,90	59,00		3746,90
Madiun	1806,00	84,00		1890,00
Sawahan	1409,00	-		1409,00
Jiwan	1791,00	-		1791,00
Jumlah total	30977,14	2131,86		33109,00

2013	30958,77	-	-	-	2151,86	33109,00
2012	26865,78	1522,00	2031,39	514,00	2196,86	33130,03/
2011	26903,78	1473,00	2082,39	514,00	2158,86	33132,03

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

Tabel 12. Luas Lahan Bukan Pertanian Menurut Penggunaannya Tahun 2014

Kecamatan	Lahan Bukan Sawah (Ha)					Jumlah total	
	Tegal/kebun	Perkebunan	Hutan rakyat	kolam	Lainnya		
Kebonsari	979,00	-	-	-	290,00	1269,00	
Geger	161,00	-	5	1	-	167,00	
Dolopo	131,00	-	-	2	1090,00	1223,00	
Dagangan	1200,70	-	-	-	1179,00	2379,70	
Wungu	348,00	-	74,00	10	350,00	782,00	
Kare	3749,00	3304,00	348,00	2	398,00	7801,0	
Gemarang	1.266,02	-	-	-	417,01	1683,03	
Saradan	688,78	-	-	-	647,05	1335,83	
Pilangkenceng	139,00	155,00	31	-	115,00	440,00	
Mejayan	255,00	-	224	-	561,00	1040,00	
Wonoasri	93,43	-	-	-	35,42	128,85	
Balerejo	391,49	-	-	-	508,80	900,29	
Madiun	82,70	-	-	-	360,81	443,51	
Sawahang	129,58	-	-	-	265	394,20	
Jiwan	60,00	-	-	-	-	60,00	
Jumlah total	9674,70	3459,00	682,00	15,00	6216,71	20047,41	
2013	9647,70	-	3459,00	682,00	15,00	6216,71	20047,41
2012	8261,29	1325,20	3479,00	672,00	15,00	6290,71	20047,20
2011	8142,30	1493,70	3489,00	579,00	15,00	632,20	20041,20

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

Tabel 13. Luas Panen, Produksi, Dan Rata-Rata Produksi Per Hektar
Tanaman Pangan Tahun 2014

Kecamatan	Padi		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-rata Produksi (GKG) (Ton/Ha)
Kebonsari	6850	52060,00	7,60
Geger	4583	30706,10	6,70
Dolopo	3302	22453,60	6,80
Dagangan	4749	30868,60	6,50
Wungu	5714	37141,00	6,50
Kare	2817	18873,90	6,70
Gemarang	2377	15688,20	6,60
Saradan	6493	46100,30	7,10
Pilangkenceng	7605	57037,50	7,50
Mejayan	5011	32070,40	6,40
Wonoasri	3652	27390,00	7,50
Balerejo	9768	66227,04	6,78
Madiun	5338	39501,20	7,40
Sawahan	3526	26797,60	7,60
Jiwan	4212	28641,60	6,80
Jumlah total	75997	531556,60	6,97
2013	76180	526099,08	6,91
2012	75782	522820,02	6,90
2011	75762	491543,86	6,49
2010	75617	485234,29	6,42

Kecamatan	Jagung			Ubi Kayu		
	Luas	Produksi	Rata-rata	Luas	Produksi	Rata-rata
	Panen (Ha)	(Ton)	Produksi (GKG) (Ton/Ha)	Panen (Ha)	(Ton)	Produksi (GKG) (Ton/Ha)
Kebonsari	1927	14452,50	7,50	40	624,00	15,60
Geger	301	1956,50	6,50	-	-	15,60
Dolopo	426	2726,40	6,40	523	8158,80	15,60
Dagangan	389	2489,60	6,40	676	10545,60	15,60
Wungu	190	950,00	5,00	194	3026,40	15,60
Kare	813	6422,70	7,90	525	8190,00	15,60
Gemarang	557	4066,10	7,30	873	13618,80	15,60
Saradan	2871	21245,40	7,40	519	8096,40	15,60
Pilangkenceng	389	3034,20	7,80	43	670,80	15,60
Mejayan	529	3967,50	7,50	140	2184,00	15,60
Wonoasri	193	1100,10	-	387	6037,20	15,60
Balerejo	-	-	-	17	265,20	15,60
Madiun	-	-	-	9	140,40	15,60
Sawahan	-	-	-	-	-	-
Jiwan	-	-	-	-	-	-
Jumlah total	8585	62411,00	6,97	3946	61557,60	15,60
2013	8573	57679,14	6,73	4560	71063,04	15,58
2012	8560	57480,40	6,72	4555	70912,24	15,57
2011	8558	57424,18	6,71	4523	70405,02	15,57
2010	9677	57210,42	5,91	6420	115149,12	17,94

Kecamatan	Ubi Jalar			Kacang Tanah		
	Luas	Produksi	Rata-rata	Luas	Produksi	Rata-rata
	Panen (Ha)	(Ton)	Produksi (GKG) (Ton/Ha)	Panen (Ha)	(Ton)	Produksi (GKG) (Ton/Ha)
Kebonsari	-	-	-	187	327,30	1,75
Geger	-	-	-	34	59,50	1,75
Dolopo	6	47,40	7,90	52	66,23	1,27
Dagangan	45	364,50	8,10	207	-	-
Wungu	5	41,50	8,30	86	118,14	1,37
Kare	106	869,20	8,20	-	-	-
Gemarang	1	7,69	7,69	47	78,00	1,66
Saradan	-	-	-	65	107,40	1,65
Pilangkenceng	12	93,60	7,80	32	48,33	1,51
Mejayan	-	-	-	32	57,28	1,79
Wonoasri	-	-	-	62	107,40	1,73
Balerejo	-	-	-	-	-	-
Madiun	-	-	-	2	3,58	1,79
Sawahan	-	-	-	-	-	-
Jiwan	-	-	-	47	84,13	1,79
Jumlah total	175	1423,89	8,14	853	1057,29	1,24
2013	172	1417,11	8,24	1074	1921,39	1,79
2012	152	1251,11	8,23	1052	1879,93	1,79
2011	109	896,96	8,23	1046	1857,70	1,78
2010	227	2416,87	10,65	1596	2638,19	1,65

Kecamatan	Kacang Hijau			Kedelai		
	Luas	Produksi	Rata-rata	Luas	Produksi	Rata-rata
	Panen (Ha)	(Ton)	Produksi (GKG) (Ton/Ha)	Panen (Ha)	(Ton)	Produksi (GKG) (Ton/Ha)
Kebonsari	-	-	-	320	416,00	1,30
Geger	269	344,40	1,28	433	736,10	1,70
Dolopo	261	321,10	1,23	473	567,60	1,20
Dagangan	236	295,00	1,25	152	243,20	1,60
Wungu	75	97,50	1,30	117	280,80	2,40
Kare	-	-	-	-	-	-
Gemarang	50	63,50	1,27	266	425,60	1,60
Saradan	54	70,20	1,30	860	1290,00	1,50
Pilangkenceng	773	1004,90	1,30	2126	4570,90	2,15
Mejayan	390	507,00	1,30	125	187,50	1,50
Wonoasri	254	325,20	1,28	110	-	-
Balerejo	286	371,80	1,30	1249	2085,83	1,67
Madiun	323	416,70	1,29	254	431,80	1,70
Sawahana	182	236,60	1,30	456	820,80	1,80
Jiwan	197	256,10	1,30	1104	1876,80	1,70
Jumlah total	3350	4310,00	1,29	8045	13932,93	1,73
2013	3277	4256,82	1,30	8036	15057,59	1,87
2012	3262	4234,05	1,30	7953	14752,86	1,86
2011	3257	4097,31	1,26	7921	14344,93	1,81
2010	5137	6452,07	1,26	7792	11500,99	1,48

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2015

6. Industri

Selama tahun 2014, pemakaian listrik terbanyak terjadi pada bulan Agustus, sedangkan yang terendah adalah di bulan Januari. Sementara jumlah pelanggan seperti biasa terus naik setiap bulan sehingga pada akhir 2014, jumlahnya telah mencapai angka 161.392 pelanggan.

Industri formal menurut dinas terkait yang menjadi sumber data adalah industri yang telah memiliki ijin usaha. Sebaliknya adalah industri non

formal. Industri kecil ada yang formal dan ada juga yang non formal. Pada tahun 2014 terdapat sejumlah 716 industri formal yang tersebar merata di 15 kecamatan. Dari jumlah 716 unit usaha formal tersebut telah menyerap sejumlah 6.477 tenaga kerja.

7. Perdagangan

Jumlah usaha perdagangan besar pada tahun 2014 tidak berubah jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan jumlah pedagang menengah dan kecil mengalami peningkatan. Stok beras di gudang bulog pada tahun 2014 mengalami naik turun setiap bulannya. Stok tertinggi terjadi pada bulan Juli.

Yang menggembirakan adalah tren jumlah pengusaha kecil yang menjadi binaan. Dinas Koperasi dan UMKM selama Tahun 2012-2014 terus mengalami peningkatan. Semoga hal tersebut akan semakin menggairahkan sektor perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun.

8. Perhubungan

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi penting guna memperlancar kegiatan perekonomian, selain untuk mempermudah mobilitas penduduk dari salah satu daerah ke daerah lainnya.

Panjang jalan menurut kondisi permukaan tanah dan jenis permukaan jalan dapat dicermati bahwa kondisi jalan yang rusak berat semakin berkurang tiap tahun, digantikan dengan kenaikan pada jalan dengan kondisi baik. Hotel maupun penginapan di Kabupaten Madiun memang terbatas jumlahnya. Pada tahun 2014 ini yang tercatat resmi hanya ada lima. Dan masing-masing memiliki fasilitas, tenaga kerja dan tarif yang ditampilkan.

9. Keuangan dan Harga-Harga

Data-data dari dua perum pegadaian yang ada di Kabupaten Madiun, Caruban dan Dolopo ditampilkan di bagian awal bab sembilan ini. Dilanjutkan dengan perkembangan keragaman koperasi yang menampilkan nama dan alamat serta nomor dan tanggal persetujuan badan hukum koperasi, baik percontohan maupun unggulan.

B. Keragaan umum sektor pertanian di Kabupaten Madiun

Setiap daerah memiliki karakteristik perekonomian yang berbeda beda termasuk karakteristik dalam sektor pertanian. Karakteristik sektor pertanian ini tergantung dari potensi setiap daerah. Kabupaten Madiun mempunyai beragam potensi yang perlu dikembangkan, baik ditinjau dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Madiun agar lebih cermat dalam memberdayakan potensi tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah meningkat maka kondisi perekonomian di Kabupaten Madiun bisa menjadi lebih baik atau setidaknya stabil. Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian maka akan dapat memperlancar jalannya pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah Kabupaten Madiun.

Perekonomian ini dilihat dari data di BPS Kabupaten Madiun terhadap BPS Provinsi Jawa Timur. Berikut data tabel PDRB Kabupaten Madiun tahun 2009-2013 serta data tabel PDRB Provinsi Jawa Timur pada tahun 2009-2013.

Tabel 14. PDRB Kabupaten Madiun Tahun 2013 (jutaan)

Sektor/subsektor	2009	2010	2011	2012
Tanaman bahan makanan	771.899,07	795.430,72	807.501,91	827.467,45
Tanaman perkebunan	130.660,72	139.820,36	144.160,83	1.491.144,8
Peternakan	128.617,35	136.250,17	150.621,63	163.360,05
Kehutanan	46.661,95	48.351,11	49.244,16	50.011,01
Perikanan	7.574,71	7.948,32	8.384,64	8.774,16
PDRB Kabupaten Madiun	2.899.885,98	3.071.607,54	3.268.564,19	3.478.780,54

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2013

Tabel 15. PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2013(jutaan)

Sektor/subsektor	2009	2010	2011	2012
Tanaman bahan makanan	27.776.011,76	28.231.662,67	28.774.273,14	29.602.961,48
Tanaman perkebunan	7.171.086,42	7.237.133,25	7.456.131,01	7.632.728,73
Peternakan	8.365.702,81	8.647.808,86	9.009.563,08	9.341.723,33
Kehutanan	639.151,59	728.382,30	772.918,65	975.927,50
Perikanan	6.256.944,13	6.484.561,71	6.615.547,26	6.910.601,73
PDRB Kabupaten Madiun	320.861168,91	342.280764,89	366.983227,46	393.662847,40

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2013

Dari data PDRB Kabupaten Madiun tersebut dapat diketahui subsektor mana yang perlu dikenali dan dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun serta apa yang akan menjadi potensi wilayahnya dalam subsektor tersebut. Sehingga strategi pembangunan daerah yang akan diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun dapat sesuai dengan potensi wilayah yang ingin dikembangkan dan dimiliki.

Kondisi sektor pertanian di Kabupaten Madiun dapat dilihat melalui beberapa variabel. Berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen, kondisi tersebut dapat dilihat melalui laju pertumbuhan dan kontribusi setiap komoditi. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai 2 variabel tersebut.

1. Laju Pertumbuhan Subsektor Pertanian di Kabupaten Madiun

Laju pertumbuhan merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan. Untuk menilai perkembangan dari suatu pembangunan yang sedang berjalan. Dalam laju pertumbuhan akan ditentukan 2 nilai, yaitu nilai positif dan negatif. Laju pertumbuhan positif berarti bahwa suatu komoditi mengalami kemajuan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan laju pertumbuhan negatif memberikan arti bahwa suatu komoditi tidak mengalami perkembangan atau mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan komoditi tanaman bahan pangan, yang terdiri dari komoditi padi dan palawija,

komoditi sayur-sayuran, dan komoditi buah-buahan yang ada di Kabupaten Madiun pada tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 16. Laju Pertumbuhan Subsektor Pertanian di Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013 (%)

Subsektor	2010	2011	2012	Rata –rata
Tanaman Pangan	3,05	1,52	2,47	2,35
Tanaman Perkebunan	7,01	3,10	3,46	4,52
Peternakan	5,93	10,55	8,46	8,31
Kehutanan	3,62	1,85	1,56	2,34
Perikanan	4,93	5,49	4,65	5,02
PDRB Kabupaten Madiun	5,92	6,41	6,43	6,26

Sumber : BPS Kabupaten Madiun Tahun 2013

Berdasarkan Tabel 16. Laju pertumbuhan subsektor pertanian di Kabupaten Madiun tahun 2009-2013 (%) , dapat diketahui bahwa pada masing-masing subsektor yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan pada tahun 2010, 2011, dan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan mengalami pertumbuhan negatif yang paling besar adalah subsektor perkebunan sebesar 3,10% sedangkan yang kedua yaitu subsektor tanaman kehutanan sebesar 1,85% kemudian yang ketiga mengalami penurunan yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 1,52%. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan hasil laju pertumbuhan pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2010 laju pertumbuhan pada subsektor tersebut cukup besar namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan. Terjadinya penurunan laju pertumbuhan pada tahun 2011 ini karena terjadi adanya penurunan pada jumlah hasil produksinya dalam laju pertumbuhan yang cukup besar pada subsektor perkebunan, kehutanan, dan subsektor tanaman pangandibanding pada tahun sebelumnya. Untuk subsektor yang mengalami pertumbuhan yang positif hanya ada satu yaitu subsektor peternakan yaitu sebesar 10,55% pada tahun 2011. Adanya peningkatan pada subsektor peternakan dapat dilihat

berdasarkan laju pertumbuhan pada hasil produksinya yang meningkat pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2010.

Pada tahun 2012, subsektor yang memiliki laju pertumbuhan cukup besar yaitu pada subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan dibandingkan pada tahun 2011. Dimana nilai laju pertumbuhan pada tahun 2012 pada subsektor tanaman pangan sebesar 2,47% sedangkan subsektor perkebunan sebesar 3,46% dan subsektor perikanan sebesar 4,65%. Dengan nilai laju pertumbuhan pada tahun 2012 yang meningkat ini dapat diketahui bahwa subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan perikanan mengalami peningkatan pada hasil produksi dengan diikuti pula dengan harga penjualan produksinya yang ikut meningkat. Sedangkan untuk pertumbuhan subsektor yang mengalami penurunan dalam laju pertumbuhannya berada pada subsektor peternakan dan subsektor kehutanan dengan laju pertumbuhan sebesar 8,46% dan 1,56% dimana terjadinya penurunan ini diketahui lebih menurun dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari setiap laju pertumbuhannya pada setiap tahunnya dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dan penurunan dalam setiap laju produksinya dalam setiap tahun pada tiap subsektor. Namun dilihat dalam tabel tersebut dapat diketahui pula bahwa laju pertumbuhan tiap subsektor mengalami peningkatan secara umum. Peningkatan secara umum ini dimaksudkan bahwa pada setiap komoditi dalam tiap subsektor mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Dimana subsektor yang memiliki hasil laju pertumbuhan yang berkelanjutan masih pada subsektor tanaman pangan, perikanan, dan subsektor peternakan. Hal ini dapat diketahui bahwa subsektor tanaman pangan, perikanan dan peternakan masih memiliki peranan penting di masyarakat dengan kondisi sebagian besar luas lahan di Kabupaten Madiun sendiri digunakan sebagai lahan pertanian dan budidaya ternak atau perikanan.

2. Kontribusi subsektor pertanian di Kabupaten Madiun

Kontribusi merupakan sumbangan yang diberikan setiap subsektor pertanian terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Madiun. Sumbangan ini dapat diketahui dengan membandingkan nilai produksi subsektor i terhadap total nilai produksi pertanian yang ada di Kabupaten Madiun. Kontribusi setiap komoditi subsektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Kontribusi Subsektor Pertanian di Kabupaten Madiun Tahun 2013 (%) (Terhadap PDRB Kabupaten Madiun)

Subsektor	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
Tanaman pangan	26,62	25,90	24,71	23,79	25,52
Tanaman perkebunan	4,51	4,55	4,41	4,29	4,44
Peternakan	4,44	4,44	4,61	4,70	4,54
Kehutanan	1,61	1,57	1,51	1,44	1,53
Perikanan	0,26	0,26	0,26	0,25	0,26
PDRB Kab Madiun	0,90	0,90	0,89	0,88	0,89

Subsektor	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
PDRB Kab. Madiun	0,90	0,90	0,89	0,88	0,89

(Terhadap Provinsi Jawa Timur)

Sumber : BPS Kabupaten Madiun 2013

Berdasarkan Tabel 17. Kontribusi subsektor pertanian di Kabupaten Madiun tahun 2009-2012 dapat diketahui bahwa kontribusi subsektor tanaman pangan dan kehutanan mengalami penurunan pada tiap tahun dari tahun 2009-2012. Sedangkan subsektor yang mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 2009-2012 yaitu subsektor perkebunan dan peternakan. Dan untuk subsektor yang mengalami kontribusi yang dapat dikatakan tetap ada pada subsektor perikanan. Subsektor peternakan merupakan yang mengalami peningkatan dalam nilai kontribusinya hal ini dikarenakan daerah Kabupaten Madiun memiliki banyak jenis-jenis hewan ternak yang banyak dibudidayakan masyarakat sehingga masih memiliki produktifitas cukup tinggi karena kondisi lahan daerahnya yang juga mendukung dalam bidang peternakan. Sedangkan subsektor yang mengalami kontribusi penurunan yaitu

subsektor tanaman pangan dan subsektor perkebunan hal ini terjadi karena dalam subsektor tanaman pangan dan perkebunan memiliki hasil yang tergantung pada iklim dan musim yang terjadi. Namun kontribusi yang berkurang pada tiap tahunnya pada hasil tanaman pangan dan perkebunan ini bukan berarti tak produktif namun tetap memberikan produktifitas yang mampu mencukupi adanya kontribusi pada subsektor tersebut walaupun hanya sedikit. Sedangkan pada subsektor perikanan terjadinya kontribusi tetap dapat diketahui bahwa hasil perikanan tetap mampu memberikan kontribusi walaupun tetap karena hasil budidaya ikan tak selalu meningkat.

Sebenarnya jika suatu subsektor memiliki kontribusi yang besar hal ini dapat meningkatkan pendapatan daerah. Karena jika jumlah produksi yang besar maka komoditi ini dapat memenuhi permintaan di daerahnya sendiri dan bahkan mampu memenuhi permintaan dari luar daerah. Namun jika nilai produksinya produksinya kecil maka suatu komoditi dapat dipastikan tidak mampu memenuhi permintaan dari daerah lain, karena untuk memenuhi kebutuhan di daerah sendiri saja belum tentu mampu. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan agar kontribusi subsektor pertanian pada tahunnya dapat meningkat. Dan juga memperluas segmen pasarnya agar pendapatan daerah Kabupaten Madiun juga dapat meningkat.

C. Klasifikasi Subsektor Pertanian di Kabupaten Madiun dengan Pendekatan Tipologi Klassen

Pengklasifikasian subsektor pertanian yang ada di Kabupaten Madiun dapat diketahui melalui analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen ini pada dasarnya membagi setiap subsektor pertanian yang ada berdasarkan dua indikator utama, yaitu laju pertumbuhan subsektor dan kontribusi subsektor terhadap PDRB Kabupaten Madiun dengan membandingkan kedua hasil indikator tersebut

Laju pertumbuhan subsektor merupakan proses perkembangan suatu subsektor dari tahun dilihat dari segi nilai produksinya. Laju pertumbuhan mempunyai dua kriteria nilai, yaitu tumbuh cepat dan tumbuh lambat. Suatu subsektor dikatakan tumbuh cepat jika laju pertumbuhan subsektor pertanian

lebih besar atau sama dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Madiun. Sedangkan suatu subsektor dikatakan tumbuh lambat jika laju pertumbuhan subsektor pertanian lebih kecil daripada laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Madiun.

Kontribusi subsektor merupakan peranan fungsi yang diberikan oleh suatu subsektor terhadap daerah. Nilai produksi mempunyai dua kriteria, yaitu kontribusi besar dan kontribusi kecil. Suatu subsektor dikatakan mempunyai dua kriteria, yaitu kontribusi besar dan kontribusi kecil. Suatu subsektor dikatakan mempunyai kontribusi besar jika kontribusi suatu subsektor pertanian lebih besar atau sama dengan dengan kontribusi pdrb Kabupaten Madiun. Sedangkan suatu subsektor dikatakan mempunyai kontribusi kecil jika kontribusi suatu subsektor pertanian lebih kecil daripada kontribusi PDRB Kabupaten Madiun.

Teknik tipologi klassen dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Menurut tipologi klassen, masing-masing sektor ekonomi di daerah dapat diklasifikasikan sebagai sektor yang prima, berkembang, potensial, dan terbelakang. Dengan menggunakan analisis tipologi klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang, seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. (Widodo,2006)

Tabel 18. Matrik Tipologi Klassen

Rerata Laju Pertumbuhan Sektoral	Rerata Kontribusi Sektoral	
	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{PDRB}}$	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{PDRB}}$
$r_{\text{sektor}} \geq r_{\text{PDRB}}$	Tipe I Sektor Prima	Tipe II Sektor Berkembang
$r_{\text{sektor}} < r_{\text{PDRB}}$	Tipe III Sektor Potensial	Tipe IV Sektor Terbelakang

Keterangan:

Y_{sektor} : nilai sektor ke-i

Y_{PDRB} : rata-rata PDRB

r_{sektor} : laju pertumbuhan sektor ke-i

r_{PDRB} : laju pertumbuhan PDRB

Dari tabel Matrik Tipologi Klassen tersebut diketahui bahwa suatu subsektor diklasifikan pada subsektor prima apabila kontribusi subsektor tersebut besar diikuti pula dengan laju pertumbuhan subsektor juga cepat, kemudian untuk klasifikasi suatu subsektor dikatakan subsektor potensial apabila kontribusi subsektor tersebut besar namun laju pertumbuhan pada subsektor tersebut cenderung lambat, pada klasifikasi subsektor dikatakan berkembang dimana kontribusi subsektor tersebut lambat namun laju pertumbuhannya cepat, dan diklasifikasikan pada subsektor terbelakang apabila kontribusi subsektor maupun laju pertumbuhannya sama- sama kecil. Dari situlah diketahui bahwa dalam hasil analisis Tipologi Klassen diperoleh empat karakteristik pola pertumbuhan dan kontribusi subsektor pertanian yang berbeda, yaitu subsektor prima, subsektor potensial, subsektor berkembang, dan subsektor terbelakang.

Sebelum diklasifikasikan kedalam matrik tipologi kelas dua indikator yaitu laju pertumbuhan serta kontribusi subsektor di Kabupaten Madiun terhadap PDRB Kabupaten Madiun dibandingkan untuk mengetahui termasuk kedalam klasifikasi sektor prima, berkembang, potensial, atau terbelakang. Berikut hasil perbandingan dari laju pertumbuhan dan kontribusi tiap subsektor pertanian di Kabupaten Madiun berada dalam Tabel 19.

Tabel 19. Perbandingan Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Subsektor Pertanian di Kabupaten Madiun terhadap PDRB Kabupaten Madiun

Sektor/subsektor	Kontribusi sektor	Kontribusi PDRB	Laju pertumbuhan sektor	Laju pertumbuhan PDRB	Kategori
Tanaman Pangan	25,25	0,89	2,35	6,26	Potensial
Tanaman perkebunan	4,44		4,54		Potensial
Peternakan	4,54		8,31		Prima
Kehutanan	1,53		2,34		Potensial
Perikanan	0,26		5,02		Terbelakang

Setelah mengetahui hasil perbandingan antara laju pertumbuhan dan kontribusi PDRB tiap subsektor pertanian di Kabupaten Madiun kemudian diklasifikasikan kedalam matrik Tipologi Klassen. Berikut hasil penggunaan Matriks hasil pengklasifikasian yang telah dilakukan terhadap subsektor pertanian yang ada di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 20 berikut ini.

Tabel 20. Matrik Tipologi Klassen subsektor pertanian di Kabupaten Madiun

kontribusi subsektor / Laju pertumbuhan subsektor	Kontribusi besar (kontribusi subsektor _i ≥ kontribusi pdrb)	Kontribusi kecil (kontribusi subsektor _i < kontribusi pdrb)
Tumbuh cepat (kontribusi subsektor ≥ kontribusi pdrb)	Subsektor prima : Subsektor peternakan	Subsektor berkembang : -
Tumbuh lambat (kontribusi subsektor < kontribusi pdrb)	Subsektor potensial : Subsektor Tanaman pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan	Subsektor terbelakang : Subsektor Perikanan

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen pada tabel 20, diperoleh klasifikasi subsektor pertanian sebagai berikut :

1. Subsektor prima : Subsektor peternakan
2. Subsektor berkembang : -
3. Subsektor potensial : Subsektor perkebunan, subsektor tanaman pangan, subsektor kehutanan
4. Subsektor terbelakang :Subsektor perikanan

1. Subsektor Prima

Subsektor prima adalah subsektor yang mempunyai laju pertumbuhan yang cepat dan memberikan kontribusi yang besar. Subsektor yang masuk dalam kategori subsektor prima dalam pertanian yaitu subsektor peternakan. Dua subsektor dalam pertanian itu dikatakan masuk dalam klasifikasi subsektor prima karena memiliki pertumbuhan subsektor yang cepat diikuti dengan kontribusi yang besar. Subsektor peternakan dikatakan cepat karena laju pertumbuhan dari setiap subsektor yang masuk dalam klasifikasi subsektor prima tersebut lebih besar dari laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Madiun. Dan dikatakan mempunyai kontribusi yang besar karena kontribusi dari masing-masing subsektor tersebut lebih besar dibandingkan kontribusi PDRB Kabupaten Madiun. Sebagai subsektor prima, maka subsektor-subsektor tersebut tentunya mempunyai peranan penting bagi Kabupaten Madiun karena subsektor-subsektor tersebut mampu memenuhi permintaan dari daerah sendiri dan juga daerah lain jika memang ada permintaan dari daerah lain dan mampu untuk dipenuhi.

Subsektor peternakan masuk dalam klasifikasi subsektor prima karena dimana sebagian mata pencaharian penduduk di Kabupaten Madiun selain sebagai petani yang utama juga memiliki mata pencaharian lain sebagai peternak. Peternakan di Kabupaten Madiun mampu dikatakan memiliki hasil produksi yang cukup meningkat. Hal ini didasarkan pada data hasil produksi peternakan di Kabupaten Madiun di dalam BPS Kabupaten tahun 2013 serta dari data laju pertumbuhan serta kontribusi subsektor peternakan. Dimana untuk ketersediaan ternak di Kabupaten Madiun mayoritas mengalami peningkatan angka jumlah baik di dalam bidang ternak maupun unggas.

Untuk produksi daging, telur, susu dan kulit mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Peningkatan produksi pada subsektor peternakan di Kabupaten Madiun ini dapat dilihat dengan adanya dukungan berupa banyaknya rumah-rumah potong untuk ternak baik itu kepemilikan pribadi maupun kepemilikan pemerintah. Selain dukungan adanya rumah potong di Kabupaten Madiun sendiri memiliki banyak jenis ternak dan unggas, dengan ternak paling banyak dibudiyakan yaitu sapi dan kambing sedangkan untuk ternak unggas yaitu ayam kampung.

Adapun potensi yang dimiliki subsektor peternakan yaitu dimana pada subsektor peternakan banyak memiliki potensi, potensi tersebut meliputi beragamnya budidaya ternak baik dari hewan ternak maupun hasil hewan ternak itu sendiri. Faktor sumberdaya baik manusia juga alam mempengaruhi tingkat potensi pada subsektor peternakan.

2. Subsektor Berkembang

Subsektor berkembang adalah subsektor yang mempunyai laju pertumbuhan sektor yang cepat tapi kontribusi sektor terhadap PDRB daerah yang diberikan kecil. Dalam hasil klasifikasi menurut Tipologi Klassen didapat bahwa dalam klasifikasi subsektor berkembang di Kabupaten Madiun tidak terdapat subsektor pertanian di yang termasuk dalam subsektor berkembang. Hal ini dikarenakan subsektor pertanian di Kabupaten Madiun memiliki laju pertumbuhan sektoral yang lambat namun kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Madiun besar sehingga dalam klasifikasi Tipologi Klassen sendiri subsektor pertanian di Kabupaten Madiun banyak digolongkan kedalam subsektor potensial.

3. Subsektor Potensial

Subsektor pertanian di Kabupaten Madiun yang termasuk dalam klasifikasi subsektor potensial adalah subsektor perkebunan, subsektor kehutanan serta subsektor tanaman pangan. Subsektor perkebunan, subsektor kehutanan,serta subsektor tanaman pangan dikelompokkan dalam subsektor potensial karena mempunyai kontribusi sektoral yang lebih besar daripada

kontribusi PDRB, tetapi laju pertumbuhan sektoralnya lebih lambat daripada laju pertumbuhan PDRB. Sebagai subsektor potensial, subsektor perkebunan dan subsektor kehutanan mampu bersaing dengan subsektor lainnya dengan potensi yang dimilikinya.

A. Subsektor Kehutanan

Selain lahan pertanian yang cukup luas di Kabupaten Madiun masih terdapat pula luas lahan kehutanan di Kabupaten Madiun. Hal ini didukung dari bentuk topografi Kabupaten Madiun yang masih memiliki banyak daerah pegunungan. Dari hal tersebut pula banyak komoditi kehutanan yang telah mampu digali sehingga memiliki peningkatan dalam hasil produksinya. Komoditi kehutanan di Kabupaten Madiun sendiri terbagi dalam 3 lingkup dengan hasil produksi pada setiap lingkup berbeda-beda, hal itu terdiri dari lingkup KPH Saradan dengan hasil produksi komoditi utamanya kayu pertukangan berupa jati dan rimba, untuk KPH Lawu sendiri hasil produksi utamanya pada kayu pertukangan jenis rimba kemudian komoditi lain berupa getah pinus, dan KPH Madiun dengan hasil produksi komoditinya berupa kayu pertukangan jenis jati dan rimba kemudian komoditi lain berupa kayu bakar jenis jati dan rimba serta komoditi daun minyak kayu putih.

Selama kurun waktu pada tahun 2014 perkembangan produksi hasil hutan Kabupaten Madiun pada setiap lingkup yang mengalami peningkatan hasil produksi yang tetap berupa kayu pertukangan jenis jati dan rimba, sedangkan untuk komoditi lain seperti daun minyak kayu putih dan getah pinus mengalami peningkatan namun tidak signifikan.

Dengan beragamnya komoditi kehutanan dan didukung dengan topografi serta aktifnya setiap lingkup KPH di Kabupaten Madiun hal ini menjadi pendukung tergalinya potensi dalam subsektor kehutanan tersebut. Sumberdaya alam serta manusia sendiri pun menjadikan potensi subsektor kehutanan menjadi lebih tergalikan dan dimanfaatkan dengan baik walaupun masih perlu adanya peningkatan dalam penggalian potensi di subsektor kehutanan tersebut agar lebih maksimal hasil dari potensi subsektor kehutanan tersebut.

B. Subsektor Perkebunan

Untuk subsektor perkebunan di Kabupaten Madiun seperti yang diketahui pada data luas lahan yang bukan pertanian menurut penggunaannya pada tahun 2014 bahwa Kabupaten Madiun memiliki lahan yang berpotensi berupa tegal/kebun dan perkebunan. Komoditi yang dihasilkan dari lahan perkebunan dan tegal/kebun di Kabupaten Madiun cukup beragam. Di Kabupaten Madiun sendiri lahan perkebunan sendiri terbagi menjadi 2 yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan swasta. Perbandingan luas areal lahan pada perkebunan tersebut sama-sama memiliki luas yang sama rata dalam penggunaannya. Komoditi pada perkebunan rakyat lebih beragam dibandingkan pada komoditi perkebunan swasta. Pada perkebunan rakyat komoditi yang banyak dibudidayakan berupa tebu, tembakau, coklat, cengkeh, kopi robusta, kelapa, porang, dan empon-emponan. Sedangkan pada perkebunan swasta komoditi yang dibudidayakan berupa kopi, karet, dan cengkeh. Komoditi pada perkebunan rakyat yang memiliki hasil produksi tinggi yaitu tebu dengan bentuk produksi berupa kristal gula, hal ini didukung pula dengan banyaknya pabrik gula berdiri di Kabupaten Madiun yang masih aktif guna menampung hasil produksinya serta areal lahan perkebunan tebu yang masih luas di Kabupaten Madiun. Terdapat pula komoditi yang masih cukup baru yaitu komoditi porang. Komoditi porang merupakan komoditi baru di Kabupaten Madiun, porang sendiri merupakan tanaman hutan yang tumbuh liar dan sering diambil umbinya untuk dikeringkan dan dijadikan tepung. Karena potensi dari tumbuhan porang yang menghasilkan menjadikan tanaman ini mulai dibudidayakan, hal ini didukung pula dengan kondisi Kabupaten Madiun yang masih memiliki banyak areal hutan.

Hasil produksi yang beragam pada komoditi perkebunan tersebut lebih berada di daerah dengan bentuk pegunungan serta daerah yang memiliki cuaca yang mendukung untuk menghasilkan komoditi tersebut. Dari data pendukung berupa penggunaan luas lahan bukan pertanian tersebut serta datapeningkatan hasil produksi serta kontribusi yang diberikan dari komoditi pada subsektor perkebunan tersebut maka pada hasil klasifikasi Tipologi

Klassen subsektor perkebunan diklasifikasikan pada subsektor potensial. Hal ini juga melihat masih besarnya potensi yang dimiliki oleh subsektor perkebunan untuk dapat mampu meningkatkan laju pertumbuhan serta meningkatkan kontribusinya yang diberikan untuk Kabupaten Madiun.

Dari potensi yang ada dari subsektor perkebunan tersebut dengan sumber daya alam dari kondisi tersebut dapat diketahui bahwa subsektor perkebunan mampu untuk memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Madiun. Bahkan dari potensi yang ada dari subsektor tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan dari dalam serta juga mampu untuk memenuhi permintaan kebutuhan dari luar Kabupaten Madiun.

C. Subsektor Tanaman Pangan

Seperti yang telah diketahui dalam kondisi umum di Kabupaten Madiun dimana sebagian besar merupakan wilayah pedesaan sehingga sesuai dengan potensi daerah yang agraris tersebut maka mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bekerja di bidang pertanian. Dengan lahan pertanian yang cukup luas dan hampir seluruhnya menghasilkan komoditi padi, dapat diketahui bahwa dimana pada data jumlah luas panen dan produksi tahun 2014 mengalami peningkatan berupa kontribusi luas panen dan hasil produksi yang terbesar di Kabupaten Madiun.

Peningkatan kontribusi luas panen dan produksi yang terjadi merupakan bentuk dari adanya keberhasilan dari pihak penyuluh pertanian serta kerja sama para petani di Kabupaten Madiun untuk lebih mengefektifkan potensi sumberdaya pertanian yang ada. Hal ini diketahui dengan mau dan mampunya para petani menerima dan mengerti penyuluhan yang diberikan untuk kemudian menerapkannya pada lahan pertanian mereka dengan tujuan hasil produksinya mampu meningkat. Kemudian aktifnya lembaga kelompok tani yang ada di setiap desa sebagai wadah bagi para petani untuk menyampaikan keadaan pertanian yang terjadi baik masalah pertanian maupun keberhasilan hasil produksinya baik antar petani maupun petani dan pihak penyuluh pertanian. Dari beberapa hal tersebutlah yang menjadikan komoditi padi di Kabupaten Madiun mampu meningkat hasil produksinya

sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah dan juga mampu untuk memenuhi permintaan daerah lain.

Di Kabupaten Madiun sendiri selain komoditi padi sebagai komoditi utama dalam subsektor tanaman pangan terdapat pula komoditi lain yang merupakan pendukung dalam pemenuhan kebutuhan dalam daerah. Komoditi lain itu berupa jagung, ubi kayu, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan ubi jalar. Komoditi jagung, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah adalah komoditi yang ditanam petani pada saat musim kemarau tiba sehingga hasil produksinya pun hanya mampu dikatakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan dalam daerah saja, sedangkan komoditi ubi kayu dan ubi jalar adalah komoditi yang ditanam para petani hanya di lahan pertanian kecil seperti pekarangan untuk mengisi lahan kosong supaya tetap produktif untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Dengan adanya beragam komoditi pertanian dan hasil produksi setiap komoditi di Kabupaten Madiun dalam lahan pertanian tersebut menjadikan data pendukung dari subsektor pangan dalam pengklasifikasian Tipologi Klassen sehingga masuk dalam subsektor potensial dimana untuk kedepannya mampu dikembangkan untuk menjadi subsector prima dengan menggali potensi yang ada dalam subsector pertanian sehingga mampu meningkatkan laju pertumbuhannya yang cepat serta kontribusi yang dihasilkan besar di Kabupaten Madiun.

4. Subsektor Terbelakang

Subsektor pertanian terbelakang adalah subsektor yang mempunyai kontribusi sektoral yang lebih kecil daripada kontribusi PDRB dan laju pertumbuhan sektoralnya lebih lambat daripada laju pertumbuhan PDRB. Dalam pengklasifikasian menggunakan Tipologi Klassen di Kabupaten Madiun sendiri dalam bidang subsektor pertaniannya yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan tersebut didapat hasil bahwa yang termasuk dalam pengklasifikasian Tipologi Klassen yaitu subsektor Perikanan.

Subsektor perikanan masuk dalam klasifikasi dalam tipologi klassen dalam subsektor terbelakang karena laju pertumbuhan dari subsektor ini lebih kecil dibanding laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Madiun. Dan dikatakan mempunyai kontribusi yang kecil karena kontribusi dari subsektor perikanan lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi PDRB Kabupaten Madiun. Sebagai subsektor terbelakang, maka subsektor tersebut bisa dikatakan kurang mampu bersaing dengan subsektor yang lain karena kurangnya dukungan dalam penggalan potensi yang ada dalam peningkatan pertumbuhannya.

Masuknya subsector perikanan dalam klasifikasi pertanian Tipologi Klassen tersebut selain kurangnya dukungan terhadap penggalan potensi dalam subsector perikanan hal lain nya karena kurang meluas. Artian kurang meluas tersebut diketahui dari lahan yang kurang serta hasil dari subsektor perikanan ini sendiri kurang diminati oleh masyarakat Kabupaten Madiun. Berdasarkan pada data Dinas peternakan dan perikanan Kabupaten Madiun petani ikan lebih banyak menggunakan kolam di pekarangan mereka untuk membudidayakan ikan, hal itu dilihat dari data dimana kolam hampir diseluruh desa memiliki kolam dibandingkan dengan lahan perairan dan lahan keramba. Banyaknya lahan kolam ini dikarenakan para petani ikan lebih memilih hasil produksi perikanan digunakan untuk kebutuhan pribadi dibandingkan untuk diperjual belikan di pasaran. Disamping itu kondisi topografi Kabupaten Madiun yang memiliki banyak sungai juga menjadi pertimbangan bagi petani ikan lebih memilih dibidang lain di luar perikanan karena banyaknya hasil produksi yang rugi akibat bencana banjir.

Dengan dukungan berupa data serta pengamatan langsung kelapangan tersebut dapat diketahui bahwa hasil produksi dari subsektor perikanan yang juga lebih sering mengalami penurunan setiap tahunnya karena kebanyakan hasil produksi perikanan tidak untuk dipasarkan namun lebih untuk dikonsumsi secara pribadi. Kurangnya lahan untuk mengembangkan subsektor perikanan menjadi pendukung masuknya subsektor perikanan pada klasifikasi subsektor terbelakang tersebut. Sebagai subsektor yang terbelakang tentu

harus mendapat perhatian khusus agar dimasa mendatang subsektor tersebut dapat lebih berkembang. Perlu adanya penggalian potensi pada subsektor perikanan dengan lebih perlu dimaksimalkan dan didayagunakan dengan lebih optimal. Potensi dalam subsektor perikanan sendiri juga kurang memiliki perhatian khusus dengan kurangnya sumberdaya baik alam maupun manusia dengan lahan untuk subsektor perikanan yang masih kurang.

D. Strategi Pengembangan Subsektor Pertanian di Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun merupakan wilayah yang memiliki lahan pertanian cukup luas dengan produktifitas setiap hasil dalam pertaniannya mampu dikatakan stabil hasil pertaniannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya tujuan untuk terwujudnya pembangunan pertanian di Kabupaten Madiun. Pelaksanaan adanya perwujudan pembangunan pertanian di Kabupaten Madiun ini diupayakan melalui adanya upaya untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang berwawasan agribisnis. Pembangunan pertanian telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat, maupun sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Faktor pendukung terwujudnya konsep pembangunan pertanian ini antara lain kesiapan terhadap sumber daya manusia, tertatanya kelembagaan, berkembangnya inovassi teknologi tepat guna, spesifik lokasi dan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain dengan tujuan untuk mencapai pembangunan pertanian di Kabupaten Madiun untuk kedepannya. Kabupaten Madiun juga memilki visi dan misi untuk peningkatan pada pertaniannya di setiap subsektornya. Visi Kabupaten Madiun yaitu Kabupaten Madiun lebih sejahtera 2018 dan misinya yaitu peningkatan perekonomian rakyat berbasis agro dan berwawasan bisnis, penguatan sistem sosial yang dinamis, berkeadilan, dan berbudaya,

peningkatan daya saing dan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan pemerintah yang demokratis dan terpercaya.

Untuk dapat mencapai adanya wujud konsep pembangunan pertanian serta visi dan misi yang telah dibuat oleh Kabupaten Madiun maka dilakukan adanya langkah pengembangan yang tepat. Pengembangan yang tepat ini dilakukan dengan melihat berdasarkan pada hasil klasifikasi subsektor pertanian melalui Tipologi Klassen dimana pada hasil klasifikasi subsektor prima yaitu subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan perlu adanya strategi pengembangan yang tepat agar tetap mampu bertahan dalam subsektor prima. Strategi pengembangan yang tepat guna menjadikan subsektor prima tetap menjadi prima ini dilakukan dengan menggunakan jangka waktu agar semakin kedepan strategi mampu diterapkan dan diawasi dengan baik. Strategi pengembangan yang berjangka ini dilakukan baik secara jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Dimana strategi pengembangan dalam jangka pendek berada dalam periode waktu antara 1-5 tahun, jangka menengah dalam periode waktu antara 5-10 tahun, dan jangka panjang dalam periode waktu antara 10-25 tahun. Pengembangan strategi dalam subsektor prima tersebut merupakan salah satu cara yang Kabupaten Madiun lakukan agar subsektor yang masuk dalam klasifikasi prima tetap mampu memberikan kontribusi serta laju pertumbuhan yang meningkat dan mampu memberikan peningkatan dalam pembangunan perekonomian di Kabupaten Madiun. Untuk mengetahui pengembangan sektor pertanian maka digunakan matriks pengembangan sektor pertanian. Matrik pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Madiun pada tabel 14.

Tabel 21. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Subsektor Prima di Kabupaten Madiun

Jangka pendek (1-5)	Jangka menengah (5-10)	Jangka panjang (10-25)
a. Peningkatan produksi peternakan	a. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam peternakan	a. Pemberian permodalan untuk dukungan penguatan bagi peternak
b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	b. Perbaiki kualitas ternak melalui peningkatan kesehatan ternak	b. Perubahan perilaku untuk memotivasi peternak
c. Peningkatan penerapan teknologi peternakan		
d. Peningkatan pemasaran hasil peternakan		

1. Pengembangan Subsektor Pertanian Jangka Pendek

Pengembangan sektor pertanian jangka pendek merupakan bentuk strategi yang diterapkan atau dilaksanakan pada jangka waktu antara 1 sampai 5 tahun kedepan. Pengembangan sektor jangka pendek ini bertujuan untuk mengupayakan subsektor pertanian prima seoptimal mungkin dalam peningkatan laju pertumbuhan dan kontribusinya agar tetap menjadi subsektor prima di Kabupaten Madiun. Dimana dari hasil dari penelitian diketahui bahwa strategi untuk pengembangan subsektor pertanian jangka pendek yaitu

a) Peningkatan produksi peternakan

Peningkatan produksi peternakan dilakukan dengan pembibitan dan perawatan ternak. Pemilihan bibit yang baik merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan hasil ternak. Misalnya dengan pengadaan sapi, kambing etawa, maupun bibit unggas unggul. Pemberian obat-obatan, vitamin, dan pakan ternak yang baik juga akan meningkatkan produksi ternak. Selain itu perlu dikembangkan adanya kawasan peternakan tertentu dengan membuka lahan untuk peternakan guna peningkatan hasil ternak. Ketersediaan pakan juga akan mempengaruhi produksi ternak. Untuk menjaga baik kualitas maupun kuantitas pakan ternak terutama hijauan

maka bisa dilakukan intensifikasi atau peremajaan lahan hijauan dengan penggunaan bibit rumput yang unggul seperti rumput gajah. Selain penggunaan pakan ternak unggul dalam peningkatan produksi peternakan juga perlu adanya inovasi dalam pakan ternak. Dengan penerapan inovasi pakan ternak yang baru diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi serta mampu untuk menanggulangi adanya kekurangan pakan ternak. Adanya inovasi pakan ternak ini juga perlu melihat biaya yang dikeluarkan agar pakan ternak tidak mengeluarkan biaya yang besar namun tetap berkualitas untuk mampu dalam peningkatan hasil produksi dalam peternakan.

b) Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak ini dilakukan dengan adanya pengadaan obat-obatan untuk ternak serta adanya pelaksanaan vaksinasi, disinfektan, dan inseminasi buatan dari penyuluh yang dilaksanakan secara merata di Kabupaten Madiun ataupun di daerah yang memiliki tingkat jumlah peternakan yang banyak. Untuk mengurangi adanya beban biaya terhadap obat-obatan untuk ternak perlu adanya subsidi untuk pengadaan obat-obatan ternak yang diberikan kepada para peternak. Dan serta adanya pengawasan terhadap hasil produk ternak seperti telur, daging, dan susu. Kerjasama antara petugas penyuluh serta para peternak juga diperlukan agar mampu mengetahui lebih cepat terhadap penanggulangan dan mencegah adanya penyakit ternak agar tidak semakin menyebar lebih cepat. Serta adanya peternak yang memiliki pendidikan yang tinggi untuk diambil menjadi penyuluh agar lebih mengerti apa yang terjadi di lapang dan terhadap hasil peternakan yang ada.

c) Peningkatan penerapan teknologi peternakan

Kabupaten Madiun yang sebgaiian besar wilayahnya merupakan pertanian memberikan strategi pengembangan bagi lahan peternakan utuk mampu meningkatkan adanya teknologi dalam pengembangan pakan

ternak. Dimana peningkatan teknologi ternak dengan cara pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna seperti pengolahan pakan ternak atau mesin penggiling pakan sehingga dihasilkan pakan ternak yang lebih efisien karena ternyata jika diamati maka banyak sumber pakan alternative yang ada disekitar lingkungan peternakan melalui lahan pertanian yang cukup luas di Kabupaten Madiun seperti keong yang kaya akan protein, daun turi dll. Dengan demikian maka akan bisa menekan biaya pakan. Teknik beternak yang baik juga perlu disosialisasikan kepada para peternak melalui adanya penyuluhan dalam bidang peternakan agar lebih mampu menghasilkan hasil ternak dan pakan ternak yang berkualitas.

d) Peningkatan pemasaran dalam hasil peternakan

Peningkatan pemasaran hasil peternakan bisa dilakukan dengan dibangunnya pusat-pusat etalase/promosi atas hasil produksi peternakan terutama promosi atas hasil peternakan unggulan daerah, pembentukan adanya penampungan dalam hasil –hasil peternakan unggulan dalam daerah yang tingkat peternakannya tinggi . Selain itu juga adanya peran dari pihak swasta yang diharapkan turut aktif dalam memasarkan produk produk peternakan. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pemasaran hasil ternak juga diperlukan agar hasil ternak mampu bersaing dengan daerah lain serta dapat memenuhi kebutuhan baik dalam maupun luar daerah. Adanya informasi bagi pihak peternak untuk lebih mengetahui tentang harga di pasar dari hasil peternakannya juga perlu diaktifkan melalui adanya peran penyuluh agar hasil ternak yang dijual tidak mengalami kerugian serta peternak mengetahui hasil ternak apa yang memiliki harga di pasaran yang tinggi sehingga mampu menjadikan peningkatan adanya harga dari hasil ternak serta tingkat produksi yang dihasilkan untuk dipasarkan.

2. Pengembangan Subsektor Pertanian Jangka Menengah

Pengembangan subsektor pertanian jangka menengah adalah bentuk strategi yang diterapkan atau dilaksanakan dengan periode waktu antara 5

sampai 10 tahun kedepan. Strategi pengembangan pada subsektor tersebut guna meningkatkan dan mempertahankan kontribusi dan laju pertumbuhannya yaitu,

a) Ketersediaan dalam sarana dan prasarana dalam peternakan

Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana dalam peternakan merupakan salah satu strategi yang didapat dari hasil penelitian di lapang, dimana akses sarana dan prasarana dalam peternakan kurang, baik untuk penyuluh maupun peternak sendiri. Para penyuluh peternakan kurang mendapat akses diantaranya transportasi, teknologi serta alat-alat pendukung dalam kegunaan penyuluhan peternakan. Bagi peternak sendiri akses sarana dan prasarana dalam alat-alat peternakan ini guna dalam penerapan hasil penyuluhan yang diberikan oleh pihak penyuluh. Dengan kurangnya akses sarana dan prasarana dalam peternakan menjadikan para peternak enggan untuk menerapkan teknologi serta inovasi yang baru kedalam bidang peternakan. Selain itu bagi pihak penyuluh sendiri tersedianya akses sarana dan prasarana dalam pertanian merupakan hal penting dalam terjadinya kelancaran dalam pelaksanaan penyuluhan kepada peternak. Sehingga petani menjadi lebih mengerti apa yang diberikan oleh pihak penyuluh serta penyuluh juga paham apa yang dibutuhkan peternak. Walaupun dengan teknologi baru yang meningkat dan diterapkan akan tetap kurang apabila kedepannya sarana dan prasarana dalam bidang peternakan yang kurang mendukung sehingga hasil yang didapat pun kurang maksimal.

b) Perbaikan kualitas ternak melalui peningkatan kesehatan ternak

Kesehatan ternak menjadi salah satu faktor penting dalam usaha ternak. Ternak ayam pedaging misalnya, kesehatan dalam ternak ayam pedaging akan menentukan hasil produktifitas daging yang dihasilkan begitu pula dalam hal hasil ternak lainnya. Kendala terkait dengan kesehatan ternak antara lain adanya berbagai macam penyakit yang menyerang ternak. Hal ini sudah mampu dikendalikan dengan adanya campur tangan pemerintah melalui dinas terkait dalam bidang peternakan

dengan adanya pemberian vaksin kepada para peternak. Namun, terkadang peternak enggan membawa ternaknya ke posko pemeriksaan jika tidak ada keluhan/ gejala gangguan kesehatan pada ternaknya sehingga menjadikan proses dalam adanya pencegahan dalam penyakit ternak menjadi terkendala. Dengan begitu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait pentingnya pemeliharaan kesehatan ternak secara intensif. Serta pemberian informasi akan adanya penyakit-penyakit yang dapat menyerang kesehatan ternak oleh pihak penyuluh kepada peternak serta pemberian penyuluhan tentang cara pencegahan untuk mengurangi semakin tersebar penyakit yang menyerang ternak. Adanya pengawasan dari pihak dinas terkait dalam bidang peternakan juga diperlukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan ternak di Kabupaten Madiun sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil ternak yang baik dan peningkatan hasil pemasaran peternakan.

3. Pengembangan Subsektor Pertanian Jangka Panjang

Pengembangan subsektor pertanian jangka panjang adalah bentuk strategi yang diterapkan dan dilaksanakan dengan jangka 10 sampai 15 tahun kedepan dengan selalu melakukan pengawasan agar hasil dari strategi yang telah ditentukan mampu mencapai hasil yang sesuai. Adapun upaya strategi yang ditempuh guna melakukan peningkatan yaitu :

a) Pemberian permodalan untuk dukungan penguatan bagi peternak

Modal usaha dalam bidang peternakan merupakan kendala yang banyak dihadapi oleh para pelaku usaha peternakan. Dimana dalam hal peternakan membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mampu menghasilkan hasil ternak yang berkualitas serta mampu bersaing dalam pasar. Dalam hal modal inilah yang menjadikan usaha dalam bidang peternakan mengalami kendala dimana setiap peternak hanya dalam skala peternakan yang relatif kecil dan mungkin hanya mampu memenuhi pasar dalam daerah sendiri. Adanya bantuan modal dari pihak pemerintah sendiri belum sepenuhnya tersalurkan secara merata dan hanya diterima oleh

sebagian peternak di Kabupaten Madiun. Hal ini terjadi karena pihak pemerintah lebih mengutamakan para peternak dengan usaha ternak skala besar namun mengesampingkan skala usaha ternak kecil serta daerah-daerah dengan usaha ternak sebagai unggulan. Sehingga para peternak dengan usaha kecil serta daerah dengan usaha ternak unggulan pun menjadi kesulitan untuk mampu meningkatkan hasil peternakannya. Dengan adanya penguatan modal dalam strategi pengembangan jangka panjang ini diharapkan mampu kembali memberikan motivasi bagi para peternak dengan usaha ternak kecil serta daerah dengan hasil unggulan peternakan untuk meningkatkan hasil produksi peternakannya. Kemudahan dalam hal mendapat modal juga memberikan semangat kembali bagi pihak peternak untuk lebih menjadikan skala usaha ternak kecil lebih menjadi skala ternak yang besar. Dengan modal usaha yang dipermudah serta penyaluran penggunaan modal yang berada dalam pengawasan juga menjadikan semakin memaksimalkan adanya peningkatan hasil produksi dalam subsector peternakan kepada pemerintah.

b) Pengubahan perilaku untuk memotivasi peternak

Kabupaten Madiun yang memiliki lahan pertanian yang lebih banyak menjadikan usaha dalam bidang peternakan hanya menjadi usaha sampingan bagi para peternak sendiri karena adanya usaha dalam bidang pertanian sendiri yang dimiliki. Hal ini menjadikan usaha peternakan menjadi kurang mendapat perhatian karena hasil dari pertanian sendiri yang dirasa lebih menguntungkan. Dengan strategi pengembangan jangka panjang oleh penyuluh dengan lebih mengefektifkan penyuluhan dalam bidang peternakan mampu mengubah perilaku dan memotivasi para peternak untuk menjadikan usaha ternak menjadi usaha utama. Sehingga lebih menghasilkan produksi yang tinggi yang mampu memberikan kontribusi lebih kepada pemerintah di Kabupaten Madiun. Hal ini perlu disertai dengan adanya pemberian keyakinan bahwa disamping lahan pertanian yang mampu menghasilkan produksi lebih juga terdapat potensi lain yang diberikan dari lahan peternakan